

Vol. 2 No.7 Maret 2012



MAJALAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

VETERAN

DARI VETERAN OLEH VETERAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA

**BERAKHIRNYA KEKUASAAN
BELANDA DI HINDIA BELANDA**

**PEMBERONTAKAN TENTARA PETA
DI BLITAR**

ISSN 2087-3530



9 772087 353010



Daftar Isi

Salam Redaksi	3
Andi Oddang Veteran Tangguh dari Sulawesi Selatan	4
Masalah Keamanan Nasional	6
Berakhirnya Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda	11
Ekspedisi Perahu Layar	16
Lintas Safari Perjalanan Juang Cikal Bakal TRIPS (Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi)	17
Pemberontakan Tentara PETA di Blitar	23
Sejarah Lahirnya LVRI	25
Marsda TNI Anumerta Abdul Halim Perdanakusuma (1922-1947)	28
Veteran Dalam Gambar	29
Beberapa Kegiatan LVRI di Pusat dan di Daerah	36
Pertempuran - Pertempuran yang dilakukan oleh ALRI Pangkalan Sibolga/Tapanuli	39
Memahami Masa Lalu, Memantapkan Visi ke depan	43
Peran Veteran dalam Membangun Kesadaran Bela Negara	49
Egoisme Kelompok Memicu Kekerasan dan Kerusuhan Sosial	55
Obrolan Bebas	57
Gugur Bunga	58

Salam Redaksi

Majalah Veteran Vol. 2 No. 7 Maret 2012 menampilkan tokoh Veteran dari daerah yakni Bpk. Andi Oddang Ketua Mada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pada terbitan edisi ini ditampilkan antara lain perjalanan juang Cikal Bakal TRIPS secara bersambung. Dibahas pula masalah Keamanan Nasional yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa khususnya Indonesia. Dalam lintas sejarah disampaikan perihal berakhirnya Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Diungkapkan pula perjuangan yang dilakukan oleh Marsda TNI (Anm) A. Halim Perdanakusuma, serta Kisah Pertempuran oleh ALRI Pangkalan Sibolga saat terjadinya Agresi II Belanda juga Kisah Pemberontakan PETA Blitar.

Mengapa ada LVRI dan Peran Veteran dalam Membangun Kesadaran Bela Negara, dimuat dalam penerbitan ini.

Untuk penerbitan - penerbitan selanjutnya kami selalu berharap untuk berbagi pengalaman khususnya yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan pembela serta pemikiran - pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Redaksi



Sampul Depan :

Bpk. Andi Oddang Ketua DPD-LVRI
Sulawesi Selatan
TMP Kabupaten Karawang

Sampul Belakang :

TMP Sampurna Raga Rawagede
Tugu Kebulatan Tekad di Kampung Bojong
Tugu Kecamatan Rengasdengklok

Penerbit DEWAN PIMPINAN PUSAT LVRI (DPP LVRI), Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" Jl. Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta 12930, Telp. (021) 5254105, 5252449, 25536744, - Fax. (021) 5254137 **Pembina/Penasehat** Rais Abin - Ketua Umum DPP LVRI, Gatot Suwardi - Wakil Ketua Umum I DPP LVRI, HBL. Mantiri - Wakil Ketua Umum II DPP LVRI, Soekotjo Tjokroatmodjo - Wakil Ketua Umum III DPP LVRI **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab** Wahyono S.K. - Sekretaris Jenderal DPP LVRI, **Dewan Redaksi** Zainal Abidin, Bantu Hardjijo, Nono Sukarno, F.X. Soejitno, Sumartono, Ismu Edi Ismakun, Soekendar, Ninik Sri Sapartinah, Alwin Nurdin, **Pemimpin Redaksi** H. A. Aziz. M, **Wakil Pemimpin Redaksi** Sugeng Rahayu, **Pemimpin Administrasi** Johanis Papalangi, **Bendahara** Maryono MA, **Sekretaris Redaksi** Kumara Dewi. **ISSN** 2087-3530 **Dicetak oleh** PT. JEKAMAS, Jakarta (isi diluar tanggung jawab percetakan)

ANDI ODDANG

VETERAN TANGGUH DARI SULAWESI SELATAN

OLEH ABU HUSEIN

Dilahirkan di Barru, 17 Juli 1926. Berbagai jabatan diembannya baik selama aktif berdinis maupun selesai purna tugas dan sekarang menjabat sebagai Ketua Markas Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merangkap anggota Dewan Paripurna Pusat LVRI tahun 1999 sampai tahun 2004, Ketua Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) yang membawahi Perguruan Tinggi UVRI dan AMI Veteran Makassar.

Setelah melakukan hijrah ke Pulau Jawa, perjalanan karirnya dalam militer diawali dengan jabatan pertama kali sebagai Komandan Kompi I Batalyon Brigade XVI 1946-1951 di Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1953 s/d 1956 menjabat sebagai Komandan Batalyon 717 XIV Hasanuddin. Berturut - turut berbagai jabatan yang dipercayakan kepadanya adalah sebagai Asisten Operasi Kodam XII Tanjung Pura, Kalimantan Barat (1958-1960). Asisten Territorial Kodam XII Tanjungpura (1960-1961), Komandan Kodim 1202 Sambas Kodam XII Tanjungpura (1961-1963), Komandan Kodim 1204 Pontianak Kodam XII Tanjungpura (1963-1964). Komandan Resimen Induk Kodam XII



Tanjungpura (1963-1964), Wakil Kepala Staf Kodam XII Tanjungpura (1966-1967). Komandan Korem 121 Kodam XII Tanjungpura (1967-1968). Setelah bertugas selama 10 tahun di jajaran Kodam Tanjung Pura dengan berbagai jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya guna membekali kemampuannya ia dikirim untuk mengikuti Pendidikan Perwira Militer Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung pada tahun 1968. Selesai mengikuti pendidikan di SESKOAD kembali mendapat

tugas di Sulawesi Selatan yakni dalam jajaran Kodam XIV Hasanuddin dengan penugasan pertama sebagai Komandan Resimen Induk Kodam XIV Hasanuddin. Jabatan ini diembannya selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 1968 s/d 1972. Jenjang karirnya meningkat mulai dari jabatan sebagai Wakil Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin pada tahun 1973 s/d 1975, hingga jabatan sebagai Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin 1975 s/d 1978. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi selama karirnya dan sekaligus merupakan jabatan terakhir di lingkungan militer. Pada saat itulah ia dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (1978-1983). Ketika menjabat sebagai Gubernur sekaligus merangkap sebagai Anggota MPR-RI (1980-1983).

Pendidikan yang telah dilaluinya, diawali dari Sekolah Rakyat di Parepare (1941). Dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan SMP di Blitar pada tahun 1948, saat itu sambil menyelesaikan pendidikannya sudah meniti karirnya sebagai anggota militer. Dalam karir militer, ia pertama kali bersentuhan dengan pendidikan perwira militer profesional dengan ditugaskan masuk dalam pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung (1957-1959).

Selain berkecimpung dalam kalangan kemiliteran, ia juga pernah bergerak dalam organisasi keolahragaan, sosial, pendidikan dan Veteran Republik Indonesia. Organisasi itu antara lain: menjabat sebagai Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) pada periode kepengurusan tahun

1958-1960, Lion Club di Makassar (1981), Rotary Club (1982), Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin (1983-1999), Dewan Penyantun IKIP (1995-1999), Dewan Penyantun Rumah Sakit Islam (1982-sekarang), Ketua Dewan Harian 45 Kalbar (1960-1963), Anggota Dewan Paripurna Angkatan 45 (1992), Ketua Legiun Veteran RI Sulawesi Selatan (1999 - sekarang), Anggota Dewan Paripurna LVRI (1999 - sekarang).

Dari pengabdianya kepada negara sebagai prajurit, ia memperoleh penghargaan beberapa bintang jasa, antara lain :

1. Bintang Gerilya
2. Bintang Kartika Eka Paksi
3. Bintang Legiun Veteran RI
4. Bintang 50 tahun Angkatan 45
5. Bintang Melati Pramuka.

Andi Oddang adalah putra kedua dari sembilan bersaudara dari ayah Makkarumpa Daeng Parani dan ibu I Sukkanng Daeng Tommi. Kedelapan saudaranya antara lain, Andi Mannaungi (alm), Lettu Andi Rivai (alm), Andi Ralle Ratu (alm), Andi Tadjuddin (alm), Andi Syafuddin, Andi Makmur dan Andi Sugiarti. Sedang istrinya adalah, Rastinah Lahade (almrh) dan Andi Mamminanga. Andi Oddang dikaruniai empat orang putra, yaitu Irvan (Makkarumpa), Taufan (Patau), Akbar dan Siradjuddin.

MASALAH KEAMANAN NASIONAL

OLEH SAYIDIMAN SURYOHADIPROJO

Keamanan Nasional sebagai padanan *National Security* adalah satu pengertian yang relatif baru, yaitu baru digunakan setelah Perang Dunia II. Hakikat Keamanan Nasional adalah keperluan untuk memelihara kelangsungan hidup satu bangsa. Di Indonesia Keamanan Nasional adalah bagian dari Ketahanan Nasional, yaitu bersama Kesejahteraan Nasional membentuk Ketahanan Nasional yang diartikan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang mewujudkan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi setiap ancaman, tantangan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian Tujuan Nasionalnya.

Jadi Keamanan Nasional tidak hanya menyangkut masalah kriminal saja seperti yang sekarang disangkakan banyak pihak. Ia meliputi berbagai masalah yang meluas dari soal-soal kriminal biasa seperti perampokan, tetapi juga soal ancaman narkoba, gangguan komunikasi dan serangan budaya, subversi ekonomi sampai kriminalitas internasional dan serangan militer secara terbuka.

Perkembangan ini terjadi karena perkembangan cara berpikir manusia yang ternyata tidak hanya digunakan untuk membawa

kebaikan dalam kehidupan, tetapi juga untuk berbagai perbuatan yang merugikan manusia dan masyarakat. Salah satu perkembangan yang amat berpengaruh adalah kemampuan manusia membuat senjata nuklir, yaitu senjata yang dapat mengakibatkan kemusnahan dahsyat. Senjata ini pertama kali digunakan AS dalam Perang Dunia II terhadap Jepang ketika ia menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang berakibat kemusnahan dan kematian manusia dalam jumlah besar sekali dan kehancuran gedung dan benda yang mengerikan. Senjata nuklir berakibat tekanan udara yang amat kuat sebagai akibat ledakan dahsyat, hal mana menimbulkan kematian dan kehancuran massal. Ditambah lagi radio aktifitas yang timbul dari sinar yang memancar amat kuat ketika terjadi ledakan, yang menambah jumlah korban. Dan terjadi debu nuklir yang lebih lagi menimbulkan kematian. Belum pernah umat manusia mengalami kehancuran dan kemusnahan sebesar itu sebelumnya.

Akan tetapi Uni Soviet yang sekutu AS dalam Perang Dunia II berubah menjadi saingan dan bahkan musuh dalam penguasaan planet Bumi. Ia juga berhasil membuat senjata serupa. Kemudian dua-duanya mengembangkan bom atom yang daya ledaknya 20 Kiloton TNT

menjadi senjata nuklir dengan daya ledak lebih dahsyat dan bahkan berhasil membuat senjata thermonuklir dengan daya ledak dalam ukuran Megaton atau jutaan ton. Bersamaan dengan itu mereka kembangkan senjata destruksi masal jenis lain dengan memanfaatkan ilmu biologi dan ilmu kimia. Kepandaian manusia ternyata tidak hanya membawa kesejahteraan materiil yang makin besar, tetapi juga kemampuan mematikan dan menghancurkan yang bersifat total.

Hal ini berakibat luas sekali, khususnya dalam hubungan antar-negara. Dulu adanya perbedaan kepentingan antar - negara diatasi dengan cara diplomasi atau berunding. Kalau diplomasi tidak membawa hasil yang memuaskan satu atau kedua pihak, mereka atasi persoalan dengan menggunakan kekerasan senjata yang dinamakan Perang. Dengan cara itu pihak yang lebih mampu menggunakan kekerasan senjata dapat memaksa lawannya untuk tunduk pada kehendaknya.

Akan tetapi ketika AS dan Uni Soviet yang bermusuhan dan keduanya mempunyai senjata nuklir, perang atau penggunaan kekerasan senjata dapat mengakibatkan kehancuran total. Sebab serangan yang dimulai satu pihak akan dibalas oleh lawannya dengan kemampuan yang tidak kalah dahsyat. Terjadi keadaan saling penghancuran yang pasti atau *Mutual Assured Destruction (MAD)*. Padahal bukan itu tujuan perang sebab dengan perang ingin diperoleh keunggulan politik terhadap lawan. Kalau terjadi kehancuran total tidak ada keunggulan politik. Akibatnya tidak ada yang mau ambil

risiko kehancuran dan di jauhi penggunaan kekerasan senjata ketika hasil Diplomasi kurang memuaskan.

Padahal perbedaan kepentingan antara AS yang membawa sekutunya Blok Barat dan Uni Soviet dengan sekutunya Blok Komunis makin kuat dan ketegangan makin memuncak. Maka dicari cara-cara lain untuk menekan pihak lawan tanpa kekerasan senjata. Inilah yang dinamakan Perang Dingin, yaitu kondisi permusuhan yang tidak kalah dari kondisi Perang dengan senjata, tetapi tak menggunakan senjata karena tidak mau ambil risiko kehancuran total oleh senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction (WMD)* pihak lawan. Karena luasnya pengaruh kedua Blok di seluruh dunia, maka planit Bumi setelah Perang Dunia II berada dalam kondisi *Perang Bukan Damaiupun Bukan (Neither War Not Peace)*.

Dalam kondisi planit Bumi seperti itu sukar tetap menggunakan penetapan status keamanan yang lazim, yaitu status tertib sipil yang meningkat kedarurat sipil kalau meningkat ketegangan dalam masyarakat. Kemudian meningkat lagi kedarurat militer dan tertinggi darurat perang. Dalam kenyataan tak ada lagi kondisi tertib sipil yang dikaitkan dengan kondisi damai penuh tanpa ketegangan dan ancaman, sebab tidak ada lagi kondisi damai penuh. Indonesia pun sejak mencapai kemerdekaan tak pernah dalam kondisi damai penuh. Setelah tahun 1950 selalu terjadi masalah keamanan yang mengancam kelangsungan hidup negara. Terjadi pemberontakan APRA,

RMS dan bersamaan dengan itu DI/TII disusul oleh pemberontakan PRRI/Permesta, masalah pembebasan Irian Barat, G30S/PKI, konfrontasi dengan Malaysia, masalah Timor Timur. Setelah itu pun Indonesia diganggu secara politik ketika unsur-unsur asing turut mempengaruhi terjadinya amandemen atas UUD 1945. Sebab itu jelas sekali penentuan status keamanan yang lazim dipakai sudah kurang relevan. Perlu kita temukan cara baru yang sesuai dengan kondisi Bumi yang *Perang Bukan Damaipun Bukan*.

Dalam kondisi Bumi sekarang semua cara digunakan pihak-pihak yang bersaing untuk merugikan lawannya kecuali penggunaan kekerasan senjata. Diplomasi dilakukan bersama-sama dengan berbagai serangan non-militer, seperti serangan intelijen, serangan politik, serangan ekonomi, informasi, budaya, dan lainnya. Semua dengan maksud untuk membuat lawan tunduk kepada kehendak penyerang.

Mungkin masih digunakan kekerasan senjata, tetapi bukan AS dan Uni Soviet yang berperang, melainkan digerakkan sekutunya seperti Perang Korea. Akan tetapi selalu dijaga agar perang tersebut tidak akan eskalasi menjadi perang antara AS dan Uni Soviet karena itu hampir pasti akan eskalasi menjadi perang nuklir umum (*general nuclear war*) yang berakibat kehancuran total.

Inilah yang menghasilkan perubahan radikal dalam hubungan antar-negara dan pengertian Keamanan Nasional (Kamnas). Perkembangan senjata konvensional, yaitu senjata bukan senjata WMD, turut maju dan makin efektif untuk

memusnahkan sasaran. Maka tidak hanya senjata nuklir dan WMD lain yang dapat menimbulkan kerugian besar pada lawan, sekalipun kehancuran oleh senjata konvensional tidak sebesar senjata nuklir dan lebih perlahan terjadinya. Dengan begitu bangsa yang tidak punya senjata nuklir tapi mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk melawan kalau diserang, juga dapat menimbulkan kerugian besar pada lawannya yang punya kekuatan senjata lebih maju. Itu dibuktikan bangsa Vietnam ketika diserang AS.

Maka lambat laun timbul pikiran bahwa mencapai keunggulan politik terhadap bangsa lain kurang risikonya, lebih murah dan lebih mudah kalau dilakukan dengan cara non-militer. Itu kemudian terbukti dengan amat jelas dan sebagai puncaknya adalah ketika AS dan Blok Barat menimbulkan keruntuhan Uni Soviet dan Blok Komunis pada tahun 1989 tanpa melakukan Perang Panas, berarti tanpa penggunaan senjata destruksi masal kedua pihak. Uni Soviet tak dapat menggunakan senjata WMD yang ia miliki dalam jumlah banyak dan kualitas tinggi untuk mencegah keruntuhan dan kekalahannya. Perang Dingin dimenangkan AS dan Blok Barat dengan ofensif non-militer yang amat efektif.

Timbul keyakinan bahwa serangan militer itu hanya memberi manfaat politik yang diinginkan kalau serangan itu dapat mewujudkan keberhasilan yang tuntas dan cepat. Namun demikian masih terjadi serangan militer sebagai tindakan pertama, seperti yang dilakukan AS terhadap Afghanistan dan kemudian Irak. Akan tetapi dua tindakan AS itu

justru membuktikan kesalahan mereka sebagai tindakan pertama. Baik di Irak dan Afghanistan hingga sekarang setelah 10 tahun AS tak dapat mencapai tujuan politiknya. Itu berarti bahwa dua serangan militer itu tidak memenuhi fungsinya sebagai sarana untuk memaksakan kehendak.

Maka masalah Kamnas terjadi bila negara dan bangsa diganggu dan dirugikan oleh pihak lain dengan menggunakan berbagai cara yang hasilnya dapat memberikan keunggulan politik bagi penyerang. Serangan tetap dapat dilakukan dengan kekerasan senjata seperti dilakukan AS terhadap Afghanistan dan Irak. Akan tetapi juga dengan cara subversi ekonomi, dominasi budaya, penguasaan komunikasi, terorisme, dan lainnya. Juga negara dapat sangat diganggu oleh kriminalitas terorganisasi internasional sekalipun mungkin penyerangnya tak ada tujuan keunggulan politik. Hal ini jelas sekali dari usaha kartel narkoba yang ingin produknya makin luas dikonsumsi umat manusia untuk membentuk kekayaan besar bagi penggerak kartel itu.

Maka jelas sekali bahwa Keamanan Nasional jauh berbeda dari Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kamtibmas yang secara tradisional menjadi fungsi Kepolisian tidak sama dengan Kamnas. Kamtibmas bagian dari Kamnas tapi bukan Kamnas. Usaha menghadapi Kamnas secara efektif bukanlah usaha “mreteli” wewenang Polri seperti yang dikemukakan sementara orang.

Jelas sekali bahwa Kamnas yang begitu luas

ruang lingkungannya harus dilakukan Pemerintah, sebagaimana juga usaha Kesejahteraan Nasional menjadi kewajiban Pemerintah. Agar dapat dilaksanakan efektif sebaiknya dibentuk DEWAN KEAMANAN NASIONAL (DKN). Dewan ini dipimpin Presiden dan semua Menteri menjadi anggota, juga Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Ka. Polri, Ka. BIN, dan pejabat lain yang dianggap perlu dengan ada seorang Sekretaris Jenderal berstatus menteri.

DKN menentukan berbagai ancaman dan masalah Kamnas yang dihadapi negara. Kemudian ditentukan instansi mana yang paling tepat menangani masalah itu, dengan didukung organisasi lain yang dianggap perlu. Seperti masalah Narkoba ditangani BNN dengan mendapat dukungan berbagai kemampuan yang ada pada bangsa, termasuk kalau perlu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Polri dan lainnya.

Menghadapi masalah Kamnas dengan begini bersifat dinamis dan selalu memperhatikan sifat ancaman serta kemampuan yang kita miliki untuk menghadapinya secara efektif. Jadi Polri tak perlu khawatir kehilangan atau dikurangi wewenangnya dan fungsinya. Akan tetapi karena menghadapi Kamnas sifatnya dinamis maka tak tertutup kemungkinan bahwa DKN menentukan cara berbeda dari yang hingga sekarang dilakukan. Yang pokok adalah bahwa negara terus meningkatkan berbagai kemampuan nasional agar dengan begitu kemampuan yang kita miliki senantiasa siap dan efektif menghadapi dan mengatasi ancaman. Terjadinya masalah Ambalat

dengan Malaysia menunjukkan kekurangan dalam pembangunan kemampuan TNI-AL dan usaha lain untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Sebab itu Keamanan Nasional dan Kesejahteraan Nasional sangat terahubungannya. Peningkatan kemampuan menghadapi Kamnas sangat tergantung pada kekayaan Negara yang dibangun melalui berbagai usaha Kesejahteraan Nasional.

Ternyata ada pihak-pihak yang tidak setuju NKRI mempunyai kemampuan mengatasi Kamnas secara efektif. Sebab perkembangan demikian bertentangan dengan kepentingan mereka. Maka berbagai usaha mereka lakukan agar pembuatan Undang-Undang Kamnas gagal. Mereka memfitnah bahwa UU Kamnas akan menjadikan NKRI negara totaliter karena mereka tahu bahwa mayoritas bangsa Indonesia belum memahami masalah Kamnas. Ada pula yang mengatakan bahwa UU Kamnas bertujuan mempertentangkan TNI dengan Polri, bahkan UU Kamnas bertujuan *mreteli* kewenangan Polri. Mereka usahakan agar perumus RUU Kamnas orang mereka yang kemudian menyusun perumusan demikian rupa sehingga pasti RUU itu ditolak DPR dan masyarakat. Dan tidak banyak beda dengan yang lalu, uang digunakan untuk *membeli* pendapat masyarakat agar menolak adanya UU Kamnas. Seperti ucapan seorang politikus anggota DPR *untuk apa bikin UU Kamnas segala!*

Jadi membangun kemampuan nyata untuk efektif menjamin Kamnas merupakan perjuangan tersendiri yang tidak ringan. Apalagi

yang merintang usaha itu termasuk negara adikuasa. Diperlukan pemberian informasi luas kepada masyarakat untuk mencegah dan menggagalkan berbagai macam fitnah. Bahkan di lingkungan TNI sendiri masih cukup banyak yang kurang memahami masalahnya secara benar. Harus disusun RUU Kamnas serta Naskah Akademisnya oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan dapat dipercaya secara ideologis untuk mencegah perumusan yang sengaja keliru dan membuat RUU Kamnas itu pasti ditolak. Juga perlu ada revisi terhadap segala perundangan yang ada sangkut pautnya dengan Kamnas, seperti UU tentang TNI dan lainnya. Sebab dalam perundangan itu tidak jarang ada perumusan yang tidak sesuai dengan perkembangan Kamnas dan oleh pihak yang tidak setuju Kamnas digunakan sebagai alasan untuk mendiskreditkan RUU Kamnas.

Bahwa RUU Kamnas yang terbit tahun 2011 ditolak memang tepat sebab perumusannya banyak sekali yang kurang memadai dan bertentangan dengan pengertian Kamnas. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena di antara perumus ada yang tidak setuju dengan UU Kamnas dan dengan sengaja membuat perumusan yang tidak mungkin diterima masyarakat dan DPR. Semoga usaha para perintang yang tidak mau melihat NKRI kuat tidak membuat kita putus asa dalam menegakkan kemampuan nyata dan efektif menjamin Kamnas NKRI. Kita harus sadar bahwa hal ini besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup Negara dan Bangsa Indonesia serta pencapaian Tujuan Nasional.

BERAKHIRNYA KEKUASAAN BELANDA DI HINDIA BELANDA

OLEH WAHYONO S.K

Serangan udara Jepang ke Pearl Harbor pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941 adalah awal dimulainya Perang Asia Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Jepang dengan kekuatan militernya ingin melebarkan kekuasaannya sampai meliputi seluruh Asia Timur Raya. Serangan Jepang pada pagi hari di Pearl Harbor itu ternyata juga sudah dibarengi dengan serangan ke Selatan sampai ke Malaysia dan Filipina (penanggalan di Asia Tenggara mencatatnya tanggal 8 Desember 1941 karena perbedaan penanggalan yang lebih cepat 24 jam).

Pertempuran di Laut Jawa

Tanggal 8 Desember 1941 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjard van Starckenborgh menyatakan perang terhadap Jepang. Gerakan tentara Jepang ternyata tidak bisa dibendung. Tanggal 10 Desember 1941 dua buah *battleship* Angkatan Laut Inggris, yaitu HMS Prince of Wales dan HMS Repulse ditenggelamkan di lepas pantai Singapura. Tanggal 15 Desember 1941 Inggris menyerahkan Singapura kepada Jepang. Dari Singapura pesawat terbang Jepang mulai membom Medan, Palembang dan Jakarta.

Armada Angkatan Laut Belanda yang dipimpin Laksamana Muda (*Schout-bij-nacht*) Karel Doorman, dipindahkan ke Hindia

Belanda setelah Belanda dikuasai Jerman. Karel Doorman dengan sebuah *Cruiser* HNLMS De Ruijter dan dua *destroyer* HNLMS Kortenaar dan HMS Exceter dari Angkatan Laut Inggris, serta beberapa kapal lain, berusaha akan menahan Armada Angkatan Laut Jepang yang sudah menguasai Tarakan, Balikpapan, Makassar dan Ambon. Tercatat dalam sejarah pertempuran laut, bahwa pertempuran di Laut Jawa sebagai salah satu pertempuran laut yang hebat dalam Perang Dunia II, yang disebut sebagai *the Naval Battle of Java Sea*.

Pertempuran laut itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1942 malam hari. Angkatan Laut Jepang menunjukkan dirinya sebagai Angkatan Laut yang sangat terlatih dalam perang laut malam hari. Pertempuran itu dilaksanakan secara konvensional *ship to ship*, tanpa melibatkan pesawat terbang. Kesatuan Armada Angkatan Laut Belanda itu lebih dahulu dihantam dengan serangan torpedo yang senyap dan tanpa percikan cahaya, sehingga musuh tidak tahu ada serangan tetapi langsung melumpuhkan sasarannya. Baru kemudian dihajar dengan salvo meriam yang membuat langit terang benderang dan mengirim Armada Angkatan Laut Belanda itu ke dasar laut. HMS Exceter di tengah pertempuran sempat melarikan diri.

Ketika fajar menyingsing keesokan harinya

di bekas tempat pertempuran laut itu yang tersisa hanya kapal-kapal berbendera Jepang yang tampak sibuk mendaratkan pasukannya ke pantai Jawa. Hari itu tanggal 29 Februari 1942 Jepang telah menguasai seluruh pantai Utara Jawa.

Penjajahan Jepang

Selain pertempuran di Laut Jawa, ternyata tidak ada perlawanan yang berarti dari tentara Hindia Belanda. Tanggal 7 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara resmi menyatakan Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Tanggal 9 Maret 1942 adalah hari yang sangat bersejarah karena pada hari itu di lapangan terbang kecil Kalijati di Subang para pembesar Hindia Belanda berhadapan dengan para pembesar Bala Tentara Jepang dalam acara penandatanganan penyerahan tanpa syarat kekuasaan atas Hindia Belanda kepada Jepang. Dari pihak Hindia Belanda hadir Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh dan Letnan Jenderal Ter Poorten sedangkan Jepang diwakili oleh Panglima Bala Tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak tanggal 9 Maret 1942 itu seluruh Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan penuh Jepang dan penjajahan Belanda atas Hindia Belanda telah berakhir secara *de facto* maupun *de jure*.

Tanggal 10 Maret 1942 seluruh tentara Belanda termasuk KNIL menyerahkan senjata kepada tentara Jepang. Mereka yang sempat melarikan diri ke Australia yang lain menjadi tawanan Jepang. Hari itu Jepang mulai menggantikan peranan Belanda sebagai penjajah. Sumatera dan Jawa dikuasai Angkatan Darat Jepang (*Rikugun*), Tentara ke 25 dan ke 16, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa

Tenggara, Maluku dan Papua dikuasai Armada Selatan II Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*). Indonesia belum merdeka, masih tanah jajahan.

Jepang menjajah Indonesia dalam keadaan sedang berperang, sehingga diperlukan upaya untuk pengerahan tenaga manusia dan kekayaan alam. Jepang menjajah dengan kejam dan keji. Kerja paksa dan kerja bakti adalah kegiatan sehari-hari. Demikian pula pengerahan tenaga kerja paksa untuk membangun keperluan perang, baik di dalam negeri maupun dikirim ke luar negeri seperti ke Burma. Mengerahkan pemuda sebagai para militer untuk membantu tentara Jepang sebagai tenaga pembantu dan pada saat terakhir dilatihnya para pemuda dengan keterampilan keprajuritan penuh untuk mempertahankan Sumatera, Jawa dan Bali, yaitu Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dengan kekuatan kurang lebih 80 Batalyon.

Seperti di jaman kolonial Belanda dahulu, Jepang juga mengajarkan pertanian masal, tidak untuk kepentingan dagang seperti Belanda, tetapi untuk penyediaan bahan pangan dan bahan industri perang. Di pertanian pun terjadi kerja paksa.

Di luar kekejaman dan kekejiannya Jepang telah mengajarkan bagaimana mengatur penduduk ke dalam rukun tetangga dan rukun warga, bagaimana mengerahkan tenaga rakyat untuk pertahanan dan sekaligus memberikan tanah air yang harus dibela terhadap para penjajah. Di samping itu para pejuang kemerdekaan yang dulu diasingkan Belanda, dibebaskan dan diajak ikut membina rakyat Indonesia. Meskipun harus dibayar dengan

mahal, pada akhir penjajahan Jepang yang singkat itu para pemuda meskipun babak belur tetapi memiliki kemampuan untuk membela tanah airnya melawan penjajah manapun, baik Jepang, Inggris, maupun Belanda.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

Tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Tenno Heika mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu. Berita itu disiarkan melalui radio ke seluruh dunia dan ditangkap para pemuda Indonesia yang sudah tidak sabar untuk lepas dari penjajahan Jepang dan menjadi bangsa yang merdeka. Para pemuda itu segera berkumpul dan sepakat untuk meminta Sukarno dan Hatta sebagai tokoh pejuang Bangsa Indonesia untuk segera mengumumkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Di luar dugaan para pemuda, Sukarno dan Hatta tidak bersedia, karena mereka merasa terikat dengan janji Jenderal Terauchi Panglima Bala Tentara Jepang untuk Asia Tenggara di Saigon tanggal 9 Agustus 1945 tentang Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Para pemuda itu kemudian menghubungi teman-teman seperjuangan mereka di PETA, yang segera disambut hangat. Malam hari itu beberapa Perwira PETA dipimpin Komandan Peleton (*Shodancho*) Singgih, yang pernah menjadi instruktur latihan kemiliteran Sukarno, membawa Sukarno dan Hatta ke luar Jakarta menuju Markas PETA di Rengasdengklok yang dipimpin Komandan Kompi (*Chudancho*) Subeno.

Terjadi perdebatan yang sengit, para Perwira PETA itu meyakinkan Sukarno dan Hatta bahwa sekaranglah saatnya untuk

mengumumkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Setelah pengumuman penyerahan Jepang kepada Sekutu, maka di Indonesia terjadi vakum kekuasaan, karena kekuasaan Belanda sudah berakhir tanggal 9 Maret 1942 dan kekuasaan Jepang berakhir tanggal 15 Agustus 1945. Maka terjadi vakum kekuasaan di Indonesia, itulah saatnya bagi Bangsa Indonesia untuk mengambil kekuasaan itu dengan menyatakan kemerdekaan Bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Bangsa Indonesia akan menyatakan kemerdekaannya atas dasar kekuatan sendiri tanpa dibantu oleh bangsa lain manapun.

Akhirnya Sukarno dan Hatta bersedia memenuhi tuntutan para pemuda dan Perwira PETA itu, sehingga keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Sukarno dan Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang segera disiarkan radio ke seluruh dunia. Bendera Merah Putih pun dikibarkan setelah pembacaan Proklamasi itu. Semua acara itu berjalan lancar karena daerah Pegangsaan Timur itu dijaga oleh pasukan PETA yang dipimpin Komandan Kompi (*Chudancho*) Latief Hendraningrat.

Tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari resmi merdekanya Bangsa Indonesia dan juga lahirnya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tanggal 18 Agustus 1945 Republik Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 19 Agustus 1945 terbentuk Kabinet Pemerintahan dengan 12 Kementerian. Tanggal 22 Agustus 1945 terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan tanggal 5 Oktober 1945 diresmikan berdirinya Tentara

Keamanan Rakyat (TKR), yang tahun 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan tahun 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Republik Indonesia telah berdiri tegak sebagai sebuah negara dengan alat pemerintahan yang lengkap.

Agresi Militer Belanda 1947 dan 1948

Tentara Sekutu baru datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan tentara Jepang pada awal Oktober 1945. Di Sumatera dan Jawa oleh tentara Inggris dan di Indonesia Timur oleh Australia. Tugas Sekutu adalah memulangkan tentara Jepang dan tentara Belanda serta orang Eropa yang ditawan Jepang. Di Jawa tugas Sekutu itu dilaksanakan oleh TKR karena tentara Inggris tidak dapat mencapai daerah pedalaman.

Kehadiran tentara Inggris tidak serta merta diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Dalam bulan Oktober sampai November 1945 terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Inggris di Sumatera dan Jawa seperti di Medan, Palembang, Bandung, Ambarawa, Semarang dan Surabaya.

Ketika tentara Inggris kemudian ditarik pulang dan ternyata meninggalkan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Hindia Belanda, pertempuran meletus di mana-mana. Tentara Belanda berperang di wilayah negara lain yang merdeka dan berdaulat. Dalam pengertian hukum dan politik internasional tindakan tentara suatu negara yang menyerang negara lain yang merdeka dan berdaulat adalah tindakan agresi militer. Agresi Militer adalah suatu kejahatan internasional yang

harus mendapat sanksi internasional dan para pemimpinnya diadili di mahkamah internasional sebagai penjahat perang.

Tiba-tiba dengan semena-mena tentara Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menyerang hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. TNI bersama rakyat Indonesia melawan dengan gigih serangan itu. Dalam sejarah serangan itu tercatat sebagai Agresi Militer Belanda I.

Serangan tentara Belanda itu ternyata kemudian diulang karena Pemerintah Republik Indonesia tidak mau mengikuti keinginan Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948 tentara Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Republik Indonesia yang sedang bersidang di Istana Kepresidenan. Sejarah mencatat tindakan brutal itu sebagai Agresi Militer Belanda II.

Namun meskipun terjadi dua kali Agresi Militer dari Belanda, perlawanan terhadap Belanda tidak berhenti. Panglima Besar Sudirman tidak ikut tertawan dan bertekad untuk bersama para prajurit TNI meneruskan perlawanan dari luar kota. Di samping itu pemerintahan Republik Indonesia tidak terputus, karena di Bukit Tinggi telah didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kegigihan para pejuang kemerdekaan melawan Belanda adalah karena adanya kesadaran dari para pejuang kemerdekaan, bahwa Belanda sudah tidak punya hak sejarah lagi untuk berkuasa di Indonesia setelah menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati.

Eksistensi dan kegigihan TNI mengejutkan dunia ketika pada tanggal 1 Maret 1949 terjadi

penyerbuan ke Yogyakarta dan TNI menguasai ibu kota itu selama 6 jam sebelum kembali masuk hutan. Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan memerintahkan Komisi PBB untuk Indonesia (*United Nations Commission for Indonesia / UNCI*) untuk memerintahkan Belanda mengakhiri serbuannya dan berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian akhirnya permusuhan Belanda dengan Indonesia diselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Pada tanggal 27 Desember 1949 bendera Merah Putih berkibar di seluruh Indonesia.

Keadilan Bagi Bangsa Indonesia

Sejarah kebangkitan Bangsa Indonesia harus ditarik mulai dari tanggal 20 Mei 1908 tentang lahirnya perkumpulan Budi Utomo, yang menandai kebangkitan kesadaran para pemuda sebagai satu Bangsa yang sejajar dengan bangsa - bangsa lain di dunia. Tonggak berikutnya adalah tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, yang sekaligus meletakkan dasar konsepsi kebangsaan Bangsa Indonesia, yang berdasar atas geopolitik satu tanah air dan berlatar budaya yang menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Sejak 1928 perjuangan untuk memerdekakan Bangsa Indonesia bergulir terus dan tidak pernah putus. Rasa nasionalisme di kalangan pemuda yang telah memperoleh identitas diri sebagai Bangsa Indonesia terus berkobar. Bangsa Indonesia harus merdeka dan menjadi bangsa yang berdaulat. Perang Dunia II, penyerahan Belanda kepada Jepang, penjajahan Jepang, kekalahan perang Jepang,

Agresi Militer Belanda I dan II, adalah tonggak-tonggak sejarah yang harus dilalui dalam perjalanan menuju dan mempertahankan Indonesia merdeka.

Setiap tonggak waktu dalam sejarah Bangsa Indonesia menandakan fase perjalanan Bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, sebagai sebuah benang merah yang ditarik dari simpul-simpul 20 Mei 1908, 28 Oktober 1928, 9 Maret 1942 dan 17 Agustus 1945. Semuanya mempunyai arti dalam sejarah kehidupan Bangsa Indonesia, termasuk tanggal 9 Maret 1942 yang menurut banyak orang tidak ada kaitannya dengan Bangsa Indonesia karena itu hanya urusan antara Belanda dan Jepang. Tetapi kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia yang dulu Hindia Belanda, menyadarkan orang akan pentingnya arti peristiwa tanggal 9 Maret 1942 itu, yaitu bahwa Belanda sejak tanggal itu sudah tidak punya hak kekuasaan apapun di Indonesia, sehingga serbuannya ke Indonesia adalah suatu Agresi Militer. Apalagi selama serbuannya ke Indonesia dari 1945 sampai 1949 banyak sekali terjadi kekejaman dan kekejian, seperti pembantaian terhadap penduduk sipil.

Parlemen Belanda sendiri telah melakukan penyelidikan dan dilaporkan dalam "*De Eksessen Nota*". Salah satu pembantaian yang telah diajukan ke Pengadilan Belanda dan dimenangkan oleh ahli waris korban adalah peristiwa pembantaian di Rawagede. Padahal yang lainnya masih banyak lagi.

Demi martabat kemanusiaan semua peristiwa pembantaian itu harus diungkap, termasuk kejahatan internasional Agresi Militernya demi keadilan bagi Bangsa Indonesia.

EKSPEDISI PERAHU LAYAR

OLEH ABU HUSEIN

Sejarah jaman “*baheula*” telah mencatat keperkasaan perahu Bugis yang menerjang ombak membelah samudra luas dan berhasil mendarat di Madagaskar.

Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tidaklah takut, menempuh badai sudah biasa.

Ekspedisi perahu layar kecil pada jaman perjuangan kemerdekaan mengulangi kejayaan masa lalu, mengarungi samudra luas menempuh jarak jauh Sulawesi – P. Jawa pergi – pulang dengan keteguhan tekad untuk membangun kekuatan perlawanan bersenjata melawan imperialis, kolonialis di Sulawesi.

Salah seorang pelaku sejarah, Andi Oddang putra Sulawesi membeberkan kisah perjalanan sejarahnya, ketika merintis dari awal pembentukan Divisi Hasanuddin sebagai organ resmi perlawanan bersenjata di Sulawesi.

Dari sejak persiapan berangkat tugas, mencari dan membeli perahu dengan uang pribadi, beber layar tarik jangkar mengarungi samudra luas hanya berbekal tekad “*to be or not to be*”.

Beberapa pelaku sejarah turut serta berkiprah dengan kehendak sendiri untuk membela negeri, antara lain Andi M. Yusuf, Andi Sose, Andi Sele, Andi Mattalata, Kahar Muzakar dan lain-lain sekitar lebih kurang 200 orang tokoh yang pada perkembangannya beberapa di antara mereka menjadi tokoh terkenal dan dikenali dalam sejarah perjuangan bangsa.

Untuk menempuh jarak panjang perjalanan penuh ancaman dan kawalan patroli Belanda Nica, menuntut bekal nyali kuat dan tabah ulet trampil mengeksploitir kekosongan celah wilayah jangkauan kemampuan patroli lawan yang lebih unggul dalam sarana dan prasarana tempur baik darat maupun laut.

Taktik siasat muslihat tipuan penyusupan, pengelabuan, penyesatan untuk mengecoh pantauan dan kepungan patroli lawan di darat dan di laut telah membawa sukses pelaksanaan tugas ekspedisi yang cukup padat dalam hitungan sebaran armada perahu layar kecil yang dihuni sekitar ukuran regu pasukan pejalan kaki.

Kronologi safari perjalanan juang Cikal Bakal Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS), dipaparkan rinci oleh Andi Oddang sebagai salah satu pelaku sejarah, dengan judul “**LINTAS SAFARI PERJALANAN JUANG CIKAL BAKAL TRIPS (TENTARA REPUBLIK INDONESIA PERSIAPAN SULAWESI)**”.



LINTAS SAFARI PERJALANAN JUANG CIKAL BAKAL TENTARA REPUBLIK INDONESIA PERSIAPAN SULAWESI (TRIPS)

OLEH ANDI ODDANG

PERSIAPAN EKSPEDISI KE JAWA

Rombongan pemuda di kota Parepare bulat tekad berangkat ke Jawa. Salah satu sebabnya karena kami tidak tahan dengan tekanan NICA/Belanda, melalui tentara Australia. Di kota Parepare, hampir setiap malam terjadi penggeledahan rumah-rumah yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan dengan alasan memiliki senjata. Memang banyak senjata yang diperoleh dari tentara Australia sendiri seperti Owen Gun dan pistol di luar organik, inilah yang dikejar-kejar NICA-Belanda di daerah *Onder Afdeling* Parepare.

Saya sebagai salah seorang di antara rombongan sudah melakukan berbagai persiapan untuk berangkat. Tekad saya sudah bulat meninggalkan Parepare. Saya sudah menyampaikan maksud ini kepada ayah dan ibu. Walaupun mereka sangat berat untuk melepaskan saya sebagai salah seorang anak yang sudah dewasa yang mereka andalkan dalam keluarga. Tetapi niat saya tidak dapat dibendung. Setelah beberapa kali mengatur pertemuan dengan kawan-kawan, kami pun menentukan hari keberangkatan. Perjalanan rombongan kami ke pulau Jawa direstui Andi Abdullah Bau Massepe, (Datu Suppa Lolo) dan Andi Makkasau (Datu Suppa Toa) yang merupakan pimpinan perjuangan dan pembina Persatuan Pemuda Nasional Indonesia (PPNI).

Saya salah seorang rombongan yang akan berangkat, memohon restu pada kedua orang tua saya dan kemudian kepada para pimpinan pejuang, Andi Bau Massepe dan Andi Makkasau. Andi Makkasau menyampaikan pesan bahwa ia tidak mempunyai uang, tetapi ia memberikan pesan *malempu'ko rilaoammu*. Surat tugas diberikan oleh Mr. Andi Zainal Abidin sebagai sekretariat Gubernur Dr. Sam Ratulangi yang kebetulan berada di Parepare untuk melakukan peninjauan mengenai situasi Parepare, sebelum ke Sengkang dan Bone. Karena persenjataan yang belum cukup, serta makin meningkatnya aksi NICA melakukan penangkapan dalam kota, maka makin mempercepat keberangkatan ke pulau Jawa.

Sebagai kepala rombongan, saya harus berusaha untuk mendapatkan perahu dan menyiapkan pemberangkatan. Keadaan pada waktu itu sudah sangat sulit karena tentara Australia telah ditarik mundur dan NICA yang sudah dipersenjatai mengambil alih kekuasaan. Karena keadaan persenjataan yang belum cukup, serta makin banyaknya penangkapan yang dilakukan NICA, tidak ada jalan lain.

Setelah persiapan telah rampung maka waktu pemberangkatan ditetapkan oleh Andi Sapada bersama saya, kemudian kami menghadap Datu Suppa Lolo Andi Abdullah Bau Massepe untuk memohon restu dan

menerima surat pangantar untuk pemerintah pusat yang ditandatangani oleh Sekretaris Gubernur Sulawesi yaitu Mr. Andi Zainal Abidin. Sebelum berangkat kami mendapat pesan dari Datu bahwa kami harus singgah di Sabbangparu untuk menjemput 2 rombongan yang sudah menunggu dengan kode obor di pantai. Setelah sampai di Sabbangparu tidak ada obor sebagai tanda di daerah tersebut. Rombongan kami mendarat dan langsung mencari rombongan tersebut tapi tidak bertemu. Kami lalu memberanikan diri bertanya pada salah satu rumah yang berdiri tersendiri. Secara kebetulan rumah tersebut adalah rumah Puang Wello yang masih ada hubungan keluarga sehingga kami dapat petunjuk tempat rombongan tersebut berada. Rupanya keberadaan mereka ada di tengah-tengah hutan nipa. Maka segera rombongan itu naik ke perahu yang jumlahnya cukup banyak. Rombongan ini terdiri dari 2 kelompok di mana kami tidak pernah mengetahui keberadaannya di Suppa.

Rombongan saya berangkat pada tanggal 30 April 1946, melalui kampung Sabbangparu, Suppa, terdiri dari : Andi Oddang, Andi Djamerro, Andi Sapada, Abdullah Zainuddin Daeng Bella, Manggu Daeng Siala, Manungke, La Beddu Ambo Same, La Pallere, La Kacong. Rombongan A. Rivai Paerai terdiri dari : A. Rivai Paerai, Syamsul Ma'arif, Algazi Salim, Arsyad Temba, Rasimin Nasution, Rasyid. Rombongan A. Sapada Wette, terdiri dari : A. Sapada Wette, La Sehang, La Marewa, Sayuti, Abunawas, Lasmin Lasiang, Ambo Abu, Daeng Gassing.

Seluruh anggota rombongan yang terdiri 23 orang, menumpang perahu jenis Lambo dengan ukuran 4 ton. Sebelum kami berangkat, pada tanggal 16 maret 1946 telah terjadi pertempuran pertama di Tonrongnge daerah Suppa yang menyebabkan gugurnya Puang Ganjeng. Pertempuran kedua terjadi tanggal 17 April 1946 di Polojiwa, Alitta.

Pasukan laskar dipimpin oleh Andi Cammi. Dari pihak NICA jatuh korban 6 orang dan dirampas senjatanya. Jenasah pasukan NICA sehari setelah tertembak baru dapat diangkut induk pasukannya, sedangkan di pihak Andi Cammi, gugur Jahya Pettena Rajeng, dan Andi Cammi mengalami luka berat yang akhirnya diungsikan ke Suppa untuk dirawat karena Suppa pada waktu itu merupakan de Facto Republik.

EKSPEDISI KE PULAU JAWA

Di kota Parepare, para pemuda tak pernah henti melancarkan aksi gangguan terhadap pasukan NICA. Malam hari para pejuang melemparkan granat ke markas NICA sehingga pihak NICA terkuras kemampuan tempurnya untuk melakukan patroli. Gerakan pemuda di Parepare dipelopori antara



lain oleh pemuda Syamsul Bachri, Andi Mannaungi, Arifin Nu'mang, tujuannya untuk mengalihkan perhatian pasukan NICA ke kota Parepare agar tidak terlalu terkonsentrasi

memukul pasukan Andi Cammi di Rappang.

Setelah rombongan dipersiapkan matang-matang penyeberangan ke pulau Jawa dilakukan dengan rombongan kecil yang sudah ditetapkan. Saya memimpin rombongan yang terdiri dari 9 orang yaitu saya sendiri sebagai ketua rombongan. Tetapi timbul masalah yakni sulitnya mendapatkan perahu yang sanggup berlayar ke Jawa beserta nahkoda yang berpengalaman. Kami baru dapat perahu dengan cara membeli pakai uang NICA sejumlah \$ 350, karena pemiliknya tidak mau terlibat bila terdapat masalah dengan NICA. Pada waktu itu, uang Jepang dinyatakan oleh NICA tidak berlaku diganti dengan uang NICA (merah). Perahu diterima di Labuang 12 kilometer sebelah selatan kota Parepare. Semua penduduk Desa Labuang Republikin, dipimpin oleh seorang yang berpengaruh, bernama Puang Toreang, bekas lasykar perang Bugis-Makassar tahun 1905 melawan Belanda.

Perahu kami berlayar pada pagi hari dengan diatur oleh Sulewatang Suppa Andi Baso Daeng Ngerang. Rupanya mereka sudah menyiapkan nahkoda dan kelasi atau awak perahu berpengalaman. Awak perahu yang disiapkan bernama Ambo Abu, Abu Nawas dan Sayuti. Kami semua bergegas naik ke perahu bersama rombongan kami yang baru, tanpa sempat saling mengenal. Hanya suara kaki kami yang tercebur di air yang terdengar. Awak perahu menyiapkan layar dan sebagian kami membantu mendorong perahu ke laut yang lebih dalam. Mata kami tertuju ke darat, dengan berharap cemas agar perahu bisa segera ke laut lepas tanpa diketahui pasukan Belanda. Udara pagi masih sangat sejuk. Dengan ketangkasan yang patut dipuji, perahu berlayar dengan laju ditiup angin darat menuju ke utara.

Perahu makin jauh ke laut lepas, setelah pagi hari di atas perahu, saya baru ketahui rombongan satu persatu yang baru naik.

Mereka itu Rivai Paerai dengan adiknya Syamsul Ma'arif, Algasi Salim, Arsyad Temba, Rasyid, Rasimin Nasution. Kemudian di antara mereka juga terdapat Andi Sapada Wette (Arung Wette), Daeng Gassing, La Sechang, Marewa, Lanjar. Kami baru tertawa ketika tahu bahwa kami semuanya saling kenal dari sekolah dan Andi Sapada Wette (Arung Wette) adalah famili sendiri, sehingga legalah perasaan kami berlayar menuju daerah Mamuju. Pada malam harinya, perahu kami menabrak sebuah perahu jenis Sande, milik penangkap ikan terbang, untung tidak terjadi apa-apa, tapi cukup mengagetkan para penumpang, keesokan harinya, kami baru tahu, buritan perahu kami bocor. Maklum, perahu kami memang sudah tua. Tanpa diperintah kami semua menimba air yang masuk ke dalam perahu dengan menggunakan peralatan apa adanya, sementara ombak mulai besar dan satu persatu penumpang diserang mabuk laut.

Perahu menuju ke Barat laut dan esok harinya kami tiba di sebuah pulau dari jajaran Pulau Laut. Penghuni pulau itu terdapat tiga keluarga orang Bajo. Perahu buang jangkar dan penumpang turun untuk istirahat memulihkan tenaga. Kami dibantu oleh keluarga bajo, penghuni pulau tersebut. Mereka pun menyampaikan informasi bahwa pulau itu sering didatangi patroli NICA, biasanya seminggu sekali. Kemudian ia melihat perahu kami menyatakan bahwa perahu ini sudah tidak layak berlayar untuk meneruskan perjalanan, kami meminta bantuan kepada penghuni pulau itu untuk memperbaiki perahu kami dan kesediaannya mengantar ke pulau Masalembo. Dalam pelayaran selama dua malam rombongan baru tiba di Pulau Masalembo dengan selamat.

Keesokan harinya, tanpa diduga mendarat di pulau itu sebuah perahu dari Suppa bernama Cahaya Baru dinahkodai oleh La Katenni. Perahu ini baru saja pulang mengantar Mursalim

Daeng Mamangung (Mantan Menteri Perburuhan). Kebetulan saya kenal awak perahu itu. Setelah kami ketemu meminta kesediaannya mengantar kami ke Jawa dan mereka akhirnya bersedia mengantar rombongan kami ke Jawa. Karena perahu yang membawa kami dari Suppa sudah rusak berat dan harus diperbaiki, terpaksa perahu itu ditinggalkan di pulau Masalembo. Kami harus meninggalkan ketiga awak perahu, Ambo Abu, Abu Nawas, La Kaco dan seorang warga Bajo. Walaupun tidak jadi mengantar kami ke tujuan, kami banyak menyampaikan terima kasih kepada awak perahu yang baik hati dan sederhana itu. Mereka semua berpesan kepada kami agar berhati-hati dalam perjalanan dan berharap kami sampai di tujuan dengan selamat. Dari Andi Sapada Wette ada pesan supaya jangan langsung pulang ke Suppa karena Belanda sudah mengetahui keberangkatan kita.

Selama berada di pulau Masalembo, rombongan dijamu oleh Asisten Wedana setempat karena pulau tersebut masih dikuasai Pemerintah Republik Indonesia. Setelah beristirahat beberapa waktu, rombongan kami berangkat lagi pada tanggal 8 Mei 1946 menuju pulau Madura. Selama dua hari berlayar, perahu tidak dapat mencapai Tanjung sebelah timur Madura, di mana terletak kota Kalianget. Ini akibat arus dari Selat Bali yang mengalir ke barat sangat deras.

Sebagian rombongan berenang ke darat karena bosan perahu tidak dapat mencapai tanjung akibat arus tadi. Anggota berjalan kaki memotong kompas atas petunjuk rakyat menuju Kalianget. Kami langsung melapor pada pos polisi setempat. Rombongan digeledah satu per satu dan diinterogasi karena rombongan tidak membawa surat-surat karena berada diperahu yang menyusul. Polisi setempat curiga karena pada waktu itu banyak mata-mata NICA disebar menyusup ke daerah Republik. Polisi setempat menghubungi

Kepala Perwakilan Kalimantan, yang juga suku Bugis. Kepala Perwakilan Kalimantan adalah Arung Pagatan bernama Andi Suconcoang. Ia tinggal bersama keluarganya. Salah seorang keluarganya ada diantaranya juga berpangkat Inspektur Polisi bernama Andi Bahrun yang kebetulan ada hubungan famili dengan Andi Djamerro salah seorang rombongan kami.

Malam harinya perahu kami telah melewati tanjung sebelah timur dan merapat di pelabuhan Kalianget, dan menyerahkan surat-surat pada polisi. Atas jaminan Inspektur Polisi Andi Bahrun, rombongan pindah ke Perwakilan Kalimantan, di sana kami menginap dua hari. Perahu yang kami tumpangi dari pulau Masalembo kembali setelah awak perahu kami berikan bekal secukupnya, dengan menggunakan uang Jepang. Saya sendiri membawa uang Jepang cukup banyak, karena waktu itu di Sulawesi uang Jepang tidak diakui sebagai alat pembayaran oleh NICA Belanda.

GANTI PERAHU

Perjalan kami lanjutkan dengan kapal kayu ke Situbondo dan merupakan kapal terakhir ke Situbondo, perairan itu dijaga ketat oleh patroli NICA Belanda. Rombongan diantar oleh Andi Maksam dari anggota BPRI Surabaya, kemenakan Andi Suconcoang sampai di Situbondo. Ketika sampai di Situbondo, kami disambut oleh Ketua KRIS yaitu Abd. Rahman dan Salman. Rombongan istirahat dua hari di Hotel Merdeka Situbondo, kemudian setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke Malang dengan kereta api diantar oleh Salman. Sementara Andi Maksam pamit untuk bergabung ke kesatuannya kembali ke front Surabaya.

Di Malang, rombongan menginap di Hotel Splendid tidak jauh dari Stasiun Embong Brantas. Kawan seperjalanan Algasi Salim, kemenakan H. Agus Salim, pamit menginap

di rumah pamannya, pemilik sebuah toko buku. Keesokan harinya, kami dikunjungi oleh Laksamana (AL) Haris, kemudian Letkol. (AL) L. Mochtar mereka menanyakan keadaan Sulawesi dan sebab-sebabnya kami menyeberang ke Jawa, semuanya dijelaskan oleh Rivai Paerai bersaudara, kami sedikit kecewa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Letkol. (AL) L. Mochtar. Tetapi Laksamana (AL) Haris, kelihatannya mengerti keadaan perjuangan pemuda di Sulawesi, khususnya di bagian selatan. Keesokan harinya rombongan kami dijemput oleh Mayor (AL) Djohan Dg. Mamangun dan Mayor (AL) Saleh Lawa ke Lawang dan Rivai Paerai menuju Yogya setelah menghadap ke Markas Besar Angkatan Laut Lawang pimpinan Laksamana Natsir.

Andi Sapada Arung Wette dan rombongan juga melanjutkan perjalanan ke Yogya menemui Andi Mattalatta dan Saleh Lahade dari kesatuan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (Trips) untuk memberikan laporan mengenai perjuangan di Sulawesi Selatan.

Setelah istirahat dua minggu di Lawang, saya dan kawan-kawan satu rombongan tersebut resmi tinggal di Lawang menjadi anggota kesatuan Angkatan Laut. Rombongan tersebut terdiri dari Andi Sapada, Syamsul Ma'rif, Arsyad Temba, Rasimin Nasution, Rasyid, Abdullah Daeng Bella, Manggu Daeng Siala, Manungke, La Beddu Ambo Sama, Pallere.

Kami bergabung dalam kesatuan 001 yang bermarkas di Sidoarjo dan menjadi pangkalan front Surabaya. Kami diberi tanda pangkat sesuai struktur organisasi. Saya lupa pangkat apa saja yang diberikan, tetapi saya dan teman-teman diberi pangkat Letnan. Saya berkaca melihat diri saya berpakaian uniform Angkatan Laut dengan pangkat Letnan. Tetapi saya kemudian tidak memakai pangkat saya, saya hanya memakai peci dengan lambang jangkar.



Rombongan juga diperkenalkan dengan Laksamana Atmaja, Laksamana Natsir, Sutrisno, di Markas Angkatan Laut Lawang. Kesatuan kami dipimpin Mayor Bolang dengan tugas sebagai intelejen. Saya dan kawan-kawan mengakui, tugas itu sangat asing bagi kami. Secara langsung kami dibimbing ke front sambil mendapat penjelasan tugas, antara lain mengumpulkan data-data kegiatan keadaan pertempuran front

Surabaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kami harus bergabung dengan pasukan terdepan dari kesatuan Angkatan Laut. Komando pertempuran pada waktu itu berkedudukan di Tanggulangin. Pada kesempatan ini, saya bisa bertemu La Balitong anak dari La Kandecing dari Parepare dan beberapa kawan lainnya yang bergabung juga pada Angkatan Laut.

Pada suatu ketika keadaan menjadi genting, pasukan NICA menyerobot dan menyerang Sidoarjo pada malam hari, sehingga semua

pasukan kacau balau di seluruh lini. Pasukan kami melakukan perlawanan. Pada sore harinya, sebelum NICA Belanda menduduki Sidoarjo tanggal 1 Januari 1947 anggota dari 001 ALRI ditarik ke Lawang dengan menumpang kereta api terakhir dengan tujuan Malang.

Setelah kejadian penyerobotan Sidoarjo menyusul Mojokerto pada tanggal 17 Maret 1947, saya dengan beberapa teman menyatakan keinginan untuk pindah dari Angkatan Laut ke Angkatan Darat. Konsekuensinya kami harus pindah ke Yogyakarta. Saya dan rombongan ingin mendapat pendidikan militer di Yogyakarta agar punya dasar kemiliteran. Semua sudah kami perhitungkan, pada mulanya komandan kesatuan kami tidak setuju dan memaksa harus tetap pada kesatuan tersebut. Keberatan komandan ini membuat sedikit ketegangan, apalagi ia ingin melucuti persenjataan yang kami peroleh dari front, berupa senjata ringan dan senjata perorangan berupa pistol. Rombongan kami menolak dan bersiap bertempur. Kami bertahan di asrama Lawang di Sumber Waras. Beruntung Mayor Saleh Lawa datang untuk memberikan nasehat agar menghindari peristiwa yang memalukan. Perselisihan antar sesama tentara Republik yang justru harus bekerjasama melawan Belanda, tidak boleh terjadi katanya. Kami semua patuh dan memahaminya.

Selain rombongan kecil yang berpindah ke Angkatan Darat, sebagian rombongan lainnya masih tetap dalam kesatuan Angkatan Laut, mereka itu antara lain, Manggu Dg. Siala, Arsyad Temba, Rasyid, Rasimin Nasution, Syamsul Maarif, Hasan Ralla, Abdullah Daeng Bella.

MENGIKUTI PENDIDIKAN

Rombongan saya, akhirnya berangkat ke Yogya, menyusul rombongan yang telah terdahulu. Perjalanan kami tempuh dengan kereta terasa cukup lama. Ketika sampai di Yogya, kami langsung melapor kepada Letkol

Kahar Muzakkar, sebagai Komandan Kesatuan TRIPS dan Andi Mattalatta sebagai wakil. Dalam kesatuan TRIPS ini juga bergabung mantan lasykar pejuang yang sudah menjadi tahanan kriminal di pulau Nusakambangan dan direkrut oleh Kahar Muzakkar atas persetujuan Panglima Besar Sudirman dan ikut serta dalam pertempuran Ambarawa.

Saat kami sampai di Yogyakarta, kami menemui staf TRIP Saleh Lahade dan Usman Djafar. Saya dengan rombongan melanjutkan perjalanan ke Solo. Tujuan kami ke Pasukan Pendidikan Kemiliteran bernama Asrama Republik Indonesia, disingkat ASRI, letaknya di Purwosari di samping Benteng, bertetangga dengan markas LASWI. Pendidikan ini berada di bawah Biro Perjuangan pimpinan Mayor Jenderal Djoko Sutono. Dia kemudian kami ketahui termasuk Group Pasukan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) bersama PKI pimpinan Muso mengadakan pemberontakan di Madiun 1948.

Anggota yang masuk dalam pendidikan antara lain adalah Eddy Sabara, Andi Sapada, Musa Gani, Syamsul Bachri, Ukkas Arifin, Bachtiar, Alim Bachri, M. Daeng Patompo, Edy Mangilep, Arsyad B, Makkarodda, Hamzah, La Tuge, Muhammadiyah, Langka, Pallere, Manungke, Saleh Syahban, Latief, Edy Muaya, Radi, Hasim, La Judda, S. Hasan, Kaso Masud, Arif Rate, Daeng Patahan, Hasan La Kallu, Djabbar, Bakil, Muharram Djaja.

Setelah tiga bulan selesai mengikuti kemiliteran di Solo, beberapa murid dari Solo dipilih untuk melanjutkan pendidikan di Magelang. Jumlah rombongan dari TRIPS dapat diterima secara selektif hanya 6 orang, Edy Sabara, Ismail (Samuel) Tambing, Musa Gani, A. Amir dan saya sendiri.

... Bersambung di Majalah berikutnya

PEMBERONTAKAN TENTARA PEMBELA TANAH AIR (PETA) DI BLITAR

OLEH NONO SUKARNO

Pemberontakan oleh tentara PETA Daidan Blitar yang terjadi pada tanggal 14 Pebruari 1945, dipicu oleh beberapa hal, antara lain seperti :

- Penderitaan rakyat yang diakibatkan penjajahan Jepang dirasakan sudah benar-benar tidak tertahankan lagi. Banyak rakyat yang dipekerjakan sebagai romusha di daerah pantai selatan Tulungagung.
- Harga diri bangsa begitu diinjak-injak penjajah Jepang yang telah memperlakukan rakyat Indonesia seperti bukan manusia.
- Kemiskinan, penderitaan, kelaparan dan kesengsaraan sudah menjangkiti rakyat banyak. Kondisi sedemikian ini telah membakar rasa nasionalisme para prajurit PETA. Dikalangan mereka timbul niat untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang.

Maka, sambil tetap mentaati perintah dan instruksi dari *Sidokan* para prajurit muda ini mulai mengamati dengan cermat apa yang menjadi kelemahan-kelemahan tentara Jepang.

Pada tanggal 14 Pebruari 1945, pukul 03.30 terdengarlah bunyi dentuman mortir di asrama PETA menandakan dimulainya serangan tentara PETA terhadap markas tentara Jepang di kota Blitar. Dengan cepat gedung yang ditempati, baik yang digunakan sebagai asrama maupun tempat tinggal tentara Jepang segera dikepung pasukan PETA. Karena terkejut atas serangan mendadak disertai kondisi ketakutan maka tidak ada seorangpun dari tentara Jepang yang berani keluar. Selanjutnya para prajurit PETA mengarahkan tembakan kearah Hotel

Sakura dan Hotel Lestari yang banyak ditempati para pembesar Jepang.

Suasana di dalam asrama menjadi bertambah hiruk - pikuk, sementara itu pertempuran terus berlangsung sampai pagi dan berkobar terus meluas di luar asrama. Jalan raya menuju Blitar dijaga secara ketat oleh tentara PETA dengan maksud untuk menghadang bantuan pasukan Jepang dari tempat lain. Dalam peristiwa itu tidak seorangpun prajurit PETA yang tewas atau luka-luka, sebaliknya dipihak Jepang banyak jatuh korban. Serangan mendadak ini dilakukan di bawah pimpinan Shodancho Supriyadi, seorang pemuda yang pada saat itu baru berumur 22 tahun dan telah menjadi tentara bentukan Jepang di Indonesia (PETA).

Bersamaan dengan peristiwa itu seorang anggota PETA yang bernama Partohardjono



berlari menjulapangan di depan markas tentara PETA dan langsung mengibarkan bendera merah putih. Jadi beberapa bulan sebelum pengibaran bendera merah-putih dikibarkan di Jakarta saat proklamasi kemerdekaan Indonesia,

di Blitar sudah pernah dikibarkan oleh tentara PETA. Sebagai catatan dari peristiwa ini, pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, tepatnya pada tanggal 14 Pebruari 1946, Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman datang ke Blitar untuk meresmikan sekaligus meletakkan karangan bunga di monumen yang didirikan untuk mengenang peristiwa ini.

Serbuan mendadak ini dinilai kurang berhasil karena hanya berlangsung selama beberapa jam saja, dan segera dapat diatasi oleh pasukan Jepang. Sebagai akibat dari pemberontakan ini, hampir seluruh pelakunya dapat ditangkap kecuali Shodancho Supriyadi.

Namundampakdariperistiwainicukupluas bahkan sampai ketinggian internasional, sehingga telah membuka mata dunia bahwa ternyata tentara didikan Jepang memiliki keberanian melawan untuk “tuannya” sendiri. Cara Jepang dalam memadamkan pemberontakan ini dilakukan dengan jalan menipu tentara PETA, di mana para pemberontak diperdaya dengan “Perjanjian Ngancar” yang diadakan pihak Jepang pada 21 Pebruari 1945. Pada perjanjian tersebut dikatakan bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia, dan tidak akan melucuti persenjataan PETA Blitar yang memberontak.

Dengan perjanjian yang demikian ini, maka para tentara yang memberontak bersedia menerima perjanjian yang disodorkan pihak Jepang, tetapi akibatnya dengan mudahnya mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman kecuali Supriyadi yang berhasil meloloskan diri.

Pemberontakan tentara PETA Blitar ini merupakan satu peristiwa monumental, karena adanya pesan moral, nasionalisme, heroisme, patriotisme dan militansi keprajuritan yang kesemuanya akhirnya bermuara pada Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikanlah sebuah monumen yang



berbentuk potlot/ pensil setinggi kurang lebih 5 meter di tempat dikibarkannya bendera merah-putih oleh tentara PETA. Pada saat kunjungan dari DPP-LVRI kondisi monumen potlot yang terletak dibagian belakang komplek Taman Makam Pahlawan R. Wijaya Blitar terlihat kurang mendapatkan perhatian, khususnya dari instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan monumen perjuangan yang tersebar di seluruh pelosok tanah-air.

Demikianlah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh tentara PETA Daidan Blitar terhadap Jepang. Pengungkapan peristiwa semacam ini sangat penting untuk menggugah dan menimbulkan rasa nasionalisme, kebersamaan, semangat bela negara serta cinta tanah air para generasi muda yang saat ini cenderung menurun. (ns)

Sumber Penulisan :

- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Daerah Kota Blitar Bersama ‘Blitar *Heritage Society*’
- Wawancara dengan Ketua DPC LVRI Blitar Bpk Soerachmat, 28 Desember 2011, di kantor Macab.

SEJARAH LAHIRNYA LVRI

OLEH GAFFAR A. LAZIM

Sejarah lahirnya LVRI, termuat secara otentik pada buku “Sekitar Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) seluruh Indonesia” terbitan 17 Agustus 1956 dari Bagian Penerangan Kongres. Kongres direncanakan akan diadakan pada tanggal 22 s/d 30 Desember 1956 di Jakarta.

Bagaimana keberadaan organisasi-organisasi Bekas Pejuang waktu itu yang sangat memerlukan adanya Kesatuan Organisasi bagi semuanya, terungkap dalam katasambutan Sekjen Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI), Letkol S. Parman : “Sejak 1950 berkali-kali diadakan Kongres-kongres, Konperensi-konperensi besar kecil oleh Organisasi-organisasi Bekas Pejuang Bersenjata maupun Organisasi-organisasi Pejuang Bekas Bersenjata. Namun demikian belumlah dapat didirikan Kesatuan Organisasi yang meliputi semua Bekas Pejuang Bersenjata maupun Pejuang Bekas Bersenjata. Kita tahu dan merasakan pula bahwa jauh lebih banyak hal-hal yang bersamaan daripada hal-hal yang berbedaan mengenai soal-soal yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut. Karena itulah unsur-unsur persatuan jauh lebih kuat daripada unsur-unsur pemisahan, sekalipun belum tercapai Kesatuan Organisasi yang meliputi semuanya.

Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan, yakni Kongres yang akan datang untuk mempertemukan perwakilan semua Bekas Pejuang Bersenjata maupun Pejuang Bekas Bersenjata yang ditunjang dan disokong secara riil oleh Pimpinan AD serta IPRI, membuka kemungkinan untuk lebih menghimpun unsur-unsur persamaan meningkat ke arah keeratan persatuan yang dapat menjelmakan Kesatuan Organisasi Nasional untuk semua Bekas Pejuang Bersenjata maupun Pejuang Bekas Bersenjata bercorak apapun asalkan bersifat nasional.

IPRI sebagai perhimpunan Corps Perwira Angkatan Perang Nasional dengan gembira menyambut pertemuan besar para bekas kawan-panggul-senjata (*brothers-in-arms*) yang idiil tetap menjadi kawan seperjuangan dan mengharapkan hasil-hasil sebesar-besarnya serta menunjang putusan yang akan dicapainya”.

PERTEMUAN BERSAMA DENGAN SUAD

Pada bulan Maret 1956 atas inisiatif AD diadakan pertemuan bersama antara organisasi-organisasi Bekas Pejuang dengan SUAD, didelegasikan kepada Perwira-perwira Panja RUU Wajib Bela Umum untuk membicarakan masalah RUU Wajib Bela Umum dan RUU Veteran, dan lain-lain.

Dalam pertemuan yang keduakalinya tercapai kesamaan pandangan dan pemikiran, bahwa lebih dari hanya menuntut adanya penghidupan yang layak, sebenarnya para Veteran menghendaki daerah sasaran yang lebih luas untuk sekali lagi supaya bisa melanjutkan darma bakti kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. Maka untuk memperbincangkan secara lebih luas masalah Bekas Pejuang pada umumnya, perlu adanya satu Kongres Bekas Pejuang Seluruh Indonesia. Kepada pihak AD diminta untuk turut aktif, setidak - tidaknya sebagai pendukung dalam usaha menyelenggarakan Kongres nanti. Karena dengan turut giatnya rekan-rekan di AD dalam kepanitiaan Kongres menunjukkan adanya rasa turut bertanggungjawab terhadap rekan-rekannya Bekas Pejuang. Lebih jauh merupakan pengertian bagi hari kemudiannya sendiri. Sebab keadaan sekarang bagi para Bekas Pejuang, sesungguhnya merupakan keadaan kemudian bagi anggota TNI bila kelak telah keluar dari dinas.

PANITIA PERSIAPAN KONGRES

Pada tanggal 12 Maret 1956 Panitia Persiapan Kongres terbentuk. Setelah menjalani berbagai perubahan akhirnya Panitia berhasil mendapatkan nama, keanggotaan, komposisi dan personalia :

Nama : Panitia Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia.

Anggota terdiri dari Wakil-wakil AD; Badan Kongres Nasional Bekas Pejuang Bersenjata RI Seluruh Indonesia; Pejuang Islam Bekas Bersenjata Seluruh Indonesia; Sekretariat Bersama Kongres Pelajar Pejuang seluruh Indonesia; Ikatan Bekas Pejuang Islam (IKABEPI) dan Ikatan Cacat Veteran Indonesia (ICVI).

Personalialia :

Ketua	-	Letkol R. Pirngadie
Wk. Ketua I	-	Sholeh Iskandar
Wk. Ketua II	-	Supardi
Sekretaris	-	Geno Susanto
Wk. Sekretaris	-	A. Sjahri

Ketua		
Bagian Keuangan	-	Hasan Basri
Ketua		
Bagian Perlengkapan	-	May. Pamurahardjo
Ketua		
Bagian Penerangan	-	May. Suharyo
Pembantu		
Bagian Penerangan	-	D. S. Tarigan
Pembantu Umum	-	Santoso
Pembantu Umum	-	Margono

TUJUAN KONGRES

Sesuai dengan cara tumbuh timbulnya cita-cita Kongres serta suasana dan semangat yang berkembang dalam pertemuan-pertemuan

sebelumnya, tujuan Kongres dapat dirumuskan oleh Panitia : **Pertama**, membentuk organisasi kerjasama Veteran yang sempurna yang dapat meliputi masa Pejuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia menuju ke arah kesatuan bimbingan dan pimpinan dalam menyelesaikan masalah Veteran sehingga bermanfaat bagi pertahanan dan pembangunan negara. **Kedua**, mencari titik-titik persamaan dan pendapat mengenai cara penyelesaian masalah Veteran, terutama di lapangan sosial - ekonomi dan politik.

PENGUNJUNG KONGRES

- 1) Utusan-utusan Organisasi Veteran dari daerah propinsi, kabupaten dan atau daerah yang dianggap setingkat dengan itu yang didirikan sebelum tanggal 10 November 1955 dengan ketentuan : Tiap-tiap utusan harus mewakili sedikit-dikitnya 250 anggota Veteran yang sah menurut UU Darurat No. 6/54, PP 6/54, PP 16/54 dan PP 32/49 dan menurut definisi Veteran dalam RUU Veteran. Utusan-utusan yang sah harus membawa daftar anggota sebanyak tersebut di atas yang dilegalisir oleh Kepala Daerah dan Kodim setempat. Kepala Ikatan Cacat Veteran diberikan perkecualian, bahwa tiap-tiap Cabang diberikan hak mengirimkan satu utusan.
- 2) Utusan-utusan dari Pimpinan Pusat Organisasi Bekas Pejuang yang mempunyai 25 Cabang yang meliputi 3 daerah propinsi dan didirikan sebelum tanggal 10 November 1955 dengan ketentuan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Wakil-wakil Instansi Pemerintah yang ada sangkut pautnya dengan penyelesaian masalah Veteran.
- 4) Orang-orang (*Oud Commandanten ex Res. Comd.* ke atas atau yang setingkat dengan itu) yang dianggap perlu oleh Panitia Kongres.

DUKUNGAN KSAD

Dengan SK No. KPTS/II/4/1956 tanggal 7 April 1956 KSAD mengesahkan terbentuknya

Panitia Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) seluruh Indonesia untuk mempersiapkan berdirinya satu Organisasi Kerjasama Veteran Perjuangan Kemerdekaan. Dan untuk mengadakan hubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah di pusat dan daerah serta badan-badan lainnya untuk keperluan Kongres.

D e n g a n surat Perintah No. SP.215/6/1956 tanggal 26 Juni 1956 kepada Panglima T.T. I s/d VII untuk terbentuknya Panitia Persiapan di propinsi yang diatur oleh seorang Perwira yang ditunjuk oleh Panglima. Panitia Persiapan di daerah hendaknya merupakan suatu Kongres Persiapan untuk Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia. Biaya Panitia supaya diusahakan oleh Panitia sendiri dengan bantuan Panglima.

Mempergunakan Pedoman Dasar, Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kongres sebagai pedoman untuk pembentukan Panitia di daerah (terlampir).

PENJELASAN PANITIA KONGRES

Dengan adanya pengesahan KSAD tentang adanya Panitia Kongres, bukanlah berarti bahwa Kongres ini diadakan oleh AD atau Pemerintah, tetapi hal ini adalah semata - mata agar bisa melancarkan jalannya bantuan yang bisa diberikan oleh AD dan Pemerintah.

Pada pokoknya proses apa yang telah dicapai oleh Panitia Kongres selalu berdasarkan persetujuan-persetujuan yang berlangsung dengan jalan permufakatan. Demikianlah hendaknya dan demikian pula yang kita rencanakan supaya sampai kepada jalannya Kongres nanti, dasar permusyawaratan ini selalu dipakai.

PRESIDEN MENYERAHKAN PANJI LVRI

Kongres yang semula dijadwalkan sampai dengan tanggal 30 Desember 1956 ternyata baru selesai pada tanggal 2 Januari 1957 pukul 12 siang, sesudah disepakati nama LVRI yang merupakan fusi 130 organisasi Pejuang Bekas Bersenjata maupun Bekas Pejuang Bersenjata

peserta Kongres. Dan pada hari itu juga pada pukul 3 sore Presiden menyerahkan Panji Karya Dharma LVRI kepada Ketua Umum LVRI disaksikan oleh 2.300 Veteran di halaman Istana Merdeka Jakarta.

PAYUNG HUKUM LVRI

- D e n g a n KEPPRES No. 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang "Legiun Veteran", pembentukan LVRI disahkan terhitung

mulai tanggal 1 Januari 1957; mengakuinya sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungannya dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Internasional. Dan mengesahkan Anggaran Dasar LVRI tertanggal 2 Januari 1957 serta Panji LVRI.

- UU No. 75 Tahun 1957 tentang Veteran Perjuangan Kemerdekaan RI, tanggal 13 Desember 1957; disempurnakan dengan :
- UUNo. 15 Tahun 1965 tentang Veteran RI, tanggal 10 Agustus 1965; disempurnakan dengan:
- UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI tanggal 7 Agustus 1967 + yang disempurnakan menunggu persetujuan DPR RI.



Detik - detik Peresmian berdirinya LVRI 2 Januari 1957

MARSDA TNI ANUMERTA ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA (1922-1947)

OLEH POENGGY POERNOMODJATI

Pahlawan Nasional

Abdul Halim Perdanakusuma adalah Penerbang Indonesia yang memiliki pengalaman di Eropa. Ia dilahirkan di Sampang, Madura, pada tanggal 18 November 1922 Putera seorang Patih di Sampang yang bernama H. Raden Bahauddin Wongsotaruno.

RIWAYAT HIDUP

Tahun 1928 Abdul Halim Perdanakusuma mulai masuk Sekolah Rakyat yang dikenal dengan nama *Hollands Inlandsche School* (HIS) di kota Sampang dan lulus tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolah setingkat SMP yang ketika itu bernama *Middel Baar Uitgebreide Lager Onderwijs* (MULO). Setelah selesai dari MULO dia melanjutkan Sekolah Pamong Projo di Kota Magelang yang bernama MOSVIA karena mengikuti harapan almarhum orang tuanya. Setelah menamatkan pendidikan Abdul Halim Perdanakusuma diangkat menjadi calon Mantri di Kantor Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Pada waktu itu dunia sedang diambang Perang Besar dan pada permulaan September 1939 pecahlah perang di Eropa antara Jerman melawan negara - negara sekutu.

Pada bulan Mei 1940 negeri Belanda diduduki Jerman, sedang Pemerintah jajahan Belanda di Indonesia mulai ketakutan melihat bahaya Jepang sebagai sekutu Jerman. Untuk menangkis serangan Jepang ini Pemerintah jajahan Belanda mengeluarkan peraturan Wajib



Militer bagi rakyat Hindia-Belanda. Oleh Bupati Probolinggo, Sdr. Abdul Halim Perdanakusuma ditunjuk untuk memasuki pendidikan Perwira Angkatan Laut Belanda di Surabaya.

(... bersambung di halaman 33)



Penyerahan Bintang LVRI kepada Menteri Pertahanan, Bpk. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, oleh Ketua Umum DPP-LVRI di Kantor Kemhan, pada tanggal 9 Februari 2012



Menteri Pertahanan Bpk. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro bersama Waketum III LVRI dan Dirjen Pot han membuka acara Sarasehan dengan para pimpinan LVRI Pusat dan Daerah di kantor Kemhan pada tanggal 6 Maret 2012



Penganugerahan Tanda Penghargaan Bintang LVRI kepada Gubernur DKI Jaya Bpk. DR. Ing. H. Fauzi Bowo, oleh Waketum III Mayjen TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo di Kantor Gubernur DKI Jaya pada tanggal 23 Februari 2012



Penganugerahan Bintang LVRI kepada Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) H. Bibit Waluyo, oleh Waketum III Mayjen TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo pada acara tasyakuran HUT ke-55 LVRI Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Januari 2012



Berfoto sejenak, para Veteran, Janda - janda Pahlawan bersama pengurus Yayasan PETA, pada acara peringatan peristiwa pemberontakan PETA Blitar di Monumen & Museum PETA Bogor pada tanggal 14 Februari 2012



Ketua DPC-LVRI Sumbawa, Bpk. H. Bengawan Onggo, foto bersama anggota Veteran setempat setelah mengadakan peringatan HUT LVRI ke-55 tanggal 14 Januari 2012



DPC-LVRI Kuala Kapuas yang dipimpin oleh H. Fadlansyah D.R telah melaksanakan peringatan HUT LVRI ke-55 pada tanggal 2 Januari 2012 di Kuala Kapuas. Kegiatan ini telah diikuti pula oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, pejabat pengadilan dan Kejaksaan Kabupaten Kapuas dan PPM setempat. Acara didahului dengan ziarah ke TMP Kabupaten Kapuas dan syukuran dilanjutkan dengan foto bersama



Upacara Peringatan Ulang Tahun LVRI ke-55 di Singkawang Kalimantan Barat pada tanggal 2 Januari 2012

(... Sambungan dari halaman 28)

MEDAN PERJUANGAN

Pada bulan Maret 1942 Jepang mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Angkatan Laut Belanda mengadakan perlawanan di Laut Jawa namun hancur oleh serangan Jepang. Sisa armada Angkatan Laut Belanda mundur ke daerah perairan di Cilacap, sesampainya di Cilacap Kapal Perang Torpedo Belanda di mana Abdul Halim Perdanakusuma sebagai anak buah kapal tenggelam dihantam Jepang. Anak buah kapal Torpedo termasuk Abdul Halim Perdanakusuma dapat diselamatkan oleh Kapal Perang Inggris dan diangkut ke Australia, yang kemudian hari dibawa ke India. Di India inilah perjalanan hidup Abdul Halim Perdanakusuma berubah. Kebiasaan melukis sejak disekolah ia memanfaatkan kesempatan dikala senggang untuk melukis Panglima Armada Inggris di India yaitu Laksamana Mount Batten. Lukisan itu digantungkan dikamarnya. Pada suatu hari Laksamana Mount Batten mengadakan Inspeksi dan melihat lukisan tersebut. Mount Batten bertanya kepada Abdul Halim Perdanakusuma “siapa yang melukis saya?” Dijawab singkat “saya sendiri”. Sejak itu terjadi hubungan pribadi antara sang Panglima Armada dengan Abdul Halim Perdanakusuma.

Oleh Sang Paglima, Abdul Halim Perdanakusuma diajukan untuk masuk pendidikan militer di Inggris, namun Abdul Halim minta untuk dipindahkan jurusan ke bagian Angkatan Udara. Sesampai di London Inggris, Abdul Halim Perdanakusuma dikirim untuk mengikuti pendidikan pada

Royal Canadian Air Force (Angkatan Udara Kerajaan Kanada) jurusan Navigasi. Sehabis mengikuti pendidikan di Kanada, Abdul Halim Perdanakusuma ditempatkan di Angkatan Udara Kerajaan Inggris (*Royal Air Force/RAF*) sebagai Perwira Navigasi dan bertugas di pesawat pembom yang dikemudian hari ia dididik menjadi seorang penerbang. Selama Perang Dunia II Abdul Halim Perdanakusuma masuk di kesatuan *Squadron* Tempur Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang terdiri dari pesawat *Lancaster* dan *Liberator*.

Pada waktu itu ia telah menyanggah pangkat Kapten Penerbang dengan pengalaman sudah empat puluh dua kali melakukan serangan udara terhadap Jerman baik pada waktu siang maupun malam hari. Suatu pengalaman yang tidak terlupakan oleh Abdul Halim Perdanakusuma adalah ketika pada tanggal 31 Desember 1944, disaat ia kembali dari melaksanakan *mission* serangan udara terhadap Jerman, ia dicegat oleh Pesawat Pemburu Jerman jenis *Focke-Wulf* yang bersenjatakan roket. Dalam perang udara ini sekutu kehilangan 3 buah pesawat pembom jenis B-17 sedang pesawat Abdul Halim Perdanakusuma kembali mendarat dengan selamat di Inggris. Oleh karena itu Angkatan Udara Kerajaan Inggris, memberinya julukan “*The Black Mascot*”, yang berarti “si jimat hitam”. Selesai perang di Eropa, ia menunggu - nunggu waktu untuk pulang ke tanah air. Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Christison mendarat di Tanjung Priok Batavia untuk menjalankan tugas melucuti senjata dari sisa tentara Jepang di Indonesia. Saat itu terlihat dalam rombongan pasukan Inggris

tersebut seorang yang berkulit sawo matang, itulah dia Abdul Halim Perdanakusuma, Kapten Penerbang dari *Royal Air Force*”.

SEBAGAI PERINTIS AURI

Setiba di Indonesia, Abdul Halim Perdanakusuma bermaksud mengunjungi kakak sepupunya yang menjadi *Residen* Kediri, namun dalam perjalanan ini ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Pasukan Republik Indonesia karena dicurigai sebagai tentara NICA. Melalui Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin akhirnya Abdul Halim Perdanakusuma dibebaskan. Setelah bebas dari penjara ia diajak oleh KSAURISurjadi Surjadarma agar turut mengabdikan kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam Angkatan Perang RI. Sebab negara dan bangsa Indonesia pada waktu itu memerlukan orang-orang yang berpengalaman serta ahli dalam dunia penerbangan.

Harapan Surjadi Surjadarma, ialah agar Abdul Halim Perdanakusuma ikut serta membina AURI. Untuk ini ia segera menyatakan kesediaannya. Pada tanggal 9 April 1946 TKR Jawatan Penerbangan secara resmi menjadi AURI dan Abdul Halim Perdanakusuma yang ikut membentuk lahirnya AURI menerima pangkat Komodor Udara. Dalam setiap perundingan antara APRI dengan Perwira - Perwira RAF, Komodor (Marsekal Pertama/Marsma) Abdul Halim Perdanakusuma selalu mendampingi KSAU. Bahkan Panglima Besar APRI Jenderal Sudirman selalu bertanya kepada Komodor Abdul Halim Perdanakusuma mengenai perkembangan AURI. Pada tanggal 29 Juli 1947 Pesawat Dakota VT-CLA ditembak jatuh oleh Pesawat Pemburu P-51 Mustang dari Angkatan

Udara Kerajaan Belanda sehingga menewaskan Komodor Udara Agustinus Adi Sutjipto serta menewaskan Prof. Dr. Abdul Rachman Saleh. Jabatan Wakil KSAU yang tadinya dijabat oleh Agustinus Adi Sutjipto digantikan oleh Komodor Udara Abdul Halim Perdanakusuma, sekaligus merangkap sebagai Komandan Operasi AURI.

Untuk memperoleh gambaran tentang peranan Komodor Udara Abdul Halim Perdanakusuma dalam melaksanakan tugasnya di AURI, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Mei 1946 bersama dengan Perwira Udara Sujono menerbangkan pesawat *Cureng* dan mendarat di tempat pengeringan garam di Sumenep.
- b. Pada tanggal 20 September 1946 bersama Imam Wirjosaputro mengadakan penerbangan ke Sumatera Selatan dalam rangka persiapan Lapangan Terbang di Sumatera.
- c. Pada tanggal 25 September 1946 kembali ke Lapangan Udara Maguwo.
- d. Melakukan penerbangan udara dengan menerobos blokade Belanda untuk membawa senjata, amunisi dan obat-obatan ke berbagai pelosok tanah air untuk para pejuang RI.
- e. Pada tanggal 29 Juli 1947 sebagai Perwira Operasi Udara merencanakan serangan dan pengeboman udara terhadap kedudukan tentara Belanda di Semarang, Ambarawa dan Salatiga.
- f. Pada tanggal 17 Oktober 1947 ikut

merencanakan penerjunan pasukan payung yang pertama kali di daerah Kalimantan Selatan dalam rangka membantu perjuangan rakyat Kalimantan.

- g. Komodor Udara Halim Perdanakusuma sebagai *flight leader* dalam formasi penerbangan dari lapangan udara Maguwo ke Kemayoran Jakarta.
- h. Pada bulan Oktober 1947 bersama dengan Komodor Udara Iswahyudi membangun, membentuk dan membina Angkatan Udara di Sumatera dengan kedudukannya di Bukit Tinggi.

GUGURNYA KOMODOR UDARA ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA

Pesawat Angkut Avro Anson RI-003 adalah pesawat sumbangan dari Ninik Mamak warga Minangkabau Sumatera Barat. Pesawat itu diterbangkan menuju ke Muangthai oleh Komodor Udara Abdul Halim Perdanakusuma bersama dengan Komodor Udara Iswahyudi dalam rangka mencari senjata dan obat-obatan untuk para pejuang di tanah air. Pada tanggal 14 Desember 1947 pesawat kembali dari Muangthai menuju ke Indonesia dengan singgah di Singapura untuk mengambil obat-obatan. Sewaktu di atas wilayah udara Malaya terjadi hujan deras dan kabut tebal, kedua penerbang berusaha mengarahkan pesawatnya menuju pantai dengan perhitungan akan lebih aman dalam penerbangannya. Namun disitulah terjadi kecelakaan di mana pesawat tersebut menghantam sebatang pohon besar yang menjulang di tepi pantai, pesawat meledak dan jatuh hancur berkeping-keping.

Tempat kejadian malapetaka tersebut terjadi di Labuhan Bilik Besar antara Tanjung Hantu dan Teluk Senangin di Pantai Lumut. Kedua penerbang gugur sebagai Kusuma Bangsa di pinggir pantai laut lepas negara Malaya.

Jatuhnya pesawat tersebut disaksikan oleh H. Johar Othman seorang guru di Lumut bersama Said Lambok saat mereka pergi menangkap ikan menyusur pantai Tanjung Hantu pada tanggal 14 Desember 1947. Gugurnya beliau di Pantai Laut Lepas itu sesuai ramalan seorang Astrolog berkebangsaan India sepuluh tahun silam. Kedua Pahlawan AURI tersebut telah gugur untuk memperjuangkan Kemerdekaan demi Bangsa dan Negara tercinta Indonesia.

Pada tanggal 17 Juli 1948 Ibu Abdul Halim Perdanakusuma di Madiun melahirkan seorang putera yang diberi nama sesuai dengan pesan almarhum bapaknya, yaitu **Ian Santoso**. Nama **Ian** diambil dari nama sahabat bapaknya yaitu seorang penerbang Inggris yang gugur dalam Perang Dunia II. Dikemudian hari Ian Santoso meneruskan cita-cita almarhum bapaknya, memasuki AKABRI Udara dan lulus sebagai Letnan Udara-II Tahun 1970. LU-II Ian Santoso bertugas sebagai penerbang di *Squadron-17* yang kemudian dipindahkan ke *Squadron-32* sebagai penerbang *Hercules*. Jabatan terakhirnya adalah Kabais TNI dengan pangkat Marsdya TNI (sekarang Purnawirawan TNI-AU).

PAHLAWANAN BANGSA

RAWE - RAWE RANTAS MALANG - MALANG PUTUNG

Pepatah ini berlaku bagi Abdul Halim Perdanakusuma yang tak gentar menghadapi lawan, resiko apapun akan dihadapi. Akhirnya ia gugur sebagai Pahlawan Bangsa.

BEBERAPA KEGIATAN LVRI DI PUSAT DAN DI DAERAH

KEGIATAN LVRI DI PUSAT

1. Universitas Veteran RI Makassar

Para Mahasiswa Universitas Veteran RI Makassar, didampingi Rektor Bpk. Prof. DR. Samsul wawancara dengan



Sekjen DPP-LVRI di Mabes LVRI Semarang pada tanggal 7 Februari 2012.

2. Pengurus DPP-PPM

Dalam rangka pelantikan Pengurus Pusat PPM yang baru di Batam akhir Februari 2012, beberapa pengurus PPM bersama dengan Ketua PPM terpilih Sdr. Lulung L. SH, telah melaksanakan audiensi dengan



Pimpinan Pusat LVRI, untuk memperoleh pengarahan - pengarahan pada tanggal 24

Februari 2012.

3. Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka peringatan Ulang Tahun LVRI ke-55 di Mada DKI Jakarta, Pertamina telah membantu pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) kepada



Para Veteran & Warakawuri, sedang menunggu giliran untuk rontgen

sejumlah Veteran dan Warakawuri, yang diikuti pula oleh beberapa anggota DPP-LVRI pada tanggal 27 Februari 2012.

KEGIATAN LVRI DI DAERAH

1. Semarang

Pengurus DPD LVRI Jawa Tengah, foto bersama, sesaat setelah audiensi dengan Pangdam IV/Diponegoro pada tanggal 20



September 2011.

2. Wonosobo

Peringatan HUT LVRI ke-55, telah diperingati oleh para Veteran DPC-LVRI Wonosobo pada tanggal 16 Januari 2012, di Wonosobo. Foto bersama pengurus DPC sesaat setelah acara peringatan HUT tersebut. Berdiri dari kiri ke kanan, yaitu



Bpk. H. Slamet Ketua Cabang, Bpk. H. Soeleman, Bpk. Ramelan dan Bpk. H. Soepoyo.

3. Jayapura

HUT ke-55 LVRI Provinsi Papua, telah dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 18 Januari 2012, bersama - sama DPC LVRI Kota dan Kabupaten Jayapura, para PPM serta pejabat sipil, militer, Polisi Jayapura. Acara dimulai dengan ziarah di TMP



Kusuma Trikora Waena Abepura, kemudian acara silaturahmi dan syukuran di Gedung

Veteran RI Granada Provinsi Papua Jalan Soa Siu No.12 Jayapura. Sejenak foto bersama di Tugu TMP Kusuma Trikora, Jayapura. Ketua DPD LVRI Provinsi Papua Bpk. Koesmanto, di tengah - tengah berseragam TNI-AD.

4. Selayar

HUT LVRI ke-55 di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diperingati pada tanggal 9 Januari 2012, dengan Inspektur Upacara ini



adalah Wakil Bupati Kepulauan Selayar.



5. Tarakan

HUT LVRI ke-55, telah diperingati di kota Tarakan pada tanggal 7 Januari 2012, oleh para anggota DPC Tarakan dan dihadiri oleh Warakawuri, anggota PPM dan para undangan.



6. Pekanbaru

Ketua DPD-LVRI Provinsi Riau, Bpk. H. Radja Roesli bersama anggota Veteran Pekanbaru, Ibu - ibu PIVERI serta para undangan telah melaksanakan peringatan HUT LVRI ke-55 pada tanggal 11 Januari 2012 di Pekanbaru. Acara didahului dengan



ziarah ke TMP Kesuma Dharma dan TMB Kesuma Bakti dilanjutkan dengan syukuran dan pemberian penghargaan kepada Babinminvetcaddam dan Kakanminvetcad se-Riau.

7. Surabaya

Ketua DPD-LVRI Provinsi Jawa Timur bersama anggota-anggota Veteran setempat, telah mengadakan peringatan Ulang Tahun LVRI ke-55 didahului dengan ziarah ke "Taman Makam Pahlawan 10 Nopember" Surabaya pada tanggal 2 Januari 2012. Kegiatan ini diikuti pula oleh para pejabat



- pejabat setempat, Ibu - ibu PIVERI/Warakawuri serta undangan - undangan lainnya, yang berjumlah sebanyak 500 orang peserta.

8. Polewali Mandar (Polman)

DPC-Polewali Mandar, Sulawesi Selatan/Barat dengan pimpinan Bpk. Abd. Rosyid Daud, BBA, bersama anggota Veteran setempat, telah melaksanakan peringatan HUT LVRI ke-55 di Polewali pada tanggal 2 Januari 2012 dengan Inspektur Upacara Sekda Kabupaten Polman. Kegiatan - kegiatan ini diikuti pula oleh para Muspida, personil Kodim, Polri, Pramuka dan Ibu - ibu PIVERI/Warakawuri setempat.

9. Sidenreng Rappang

Ketua DPC-LVRI Sidenreng Rappang Bpk. Ladjumare Tjili bersama anggota Veteran, Janda Veteran, Keluarga Veteran dan para undangan telah melaksanakan peringatan HUT LVRI ke-55 pada tanggal 16 Januari 2012 di Pangkajene. Peserta upacara ini adalah sebanyak 256 orang.



PERTEMPURAN - PERTEMPURAN YANG DILAKUKAN OLEH ALRI PANGKALAN SIBOLGA/TAPANULI

OLEH SUGENG RAHAYU

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi Militer II dengan melancarkan penyerbuan secara mendadak ke ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta menggunakan pasukan gerak cepat Angkatan Udaranya. Tindakan agresi ini juga dilakukan ke daerah-daerah wilayah RI lainnya secara menyeluruh, termasuk penyerbuannya ke Sibolga. Penyerbuan ini dilakukan dari dua jurusan yaitu sebagian melalui darat dari Tarutung sedang yang lain melalui penerjunan dari udara di lapangan terbang Pinangsori. Menghadapi agresi ini, ALRI Tapanuli sangat kewalahan mengingat luka-luka yang dialami selama perang “saudara” belum pulih, keadaan pasukan tempur nampak dalam keadaan letih serta senjata-senjata banyak yang rusak dan hilang.

Komandan *Sub/Teritorial* VII/Tapanuli Sumatera Timur Letkol A.E. Kawilarang mengadakan pembalasan kepada Belanda dengan melaksanakan taktik perang gerilya, melalui titik-titik basis evaluasi Naval Distrik Utara (NDU) ALRI sebagai berikut :

- a) Tempat penyimpanan perbekalan dan arsip serta alat tulis ditetapkan Kampung Hutaimbaru Julu di Poriaha
- b) Perbekalan Staf dan pasukan Pangkalan “A” ditetapkan di Kampung Sibunga-bunga.
- c) Pemencaran pasukan di Kampung Mela Dolok dan Sirora.

Pada saat situasi kritis seperti ini, Komandan Pangkalan Besar Letkol Laut A. Husin Lubis berangkat ke Mandailing untuk mengantarkan isterinya tanpa meninggalkan pesan dan pemberitahuan. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota pasukan. Untuk menjaga keutuhan dan semangat juang pasukan, sekaligus mengatur konsolidasi organisasi NDU/ALRI, keseluruhan pimpinan diambil alih oleh Letkol Laut H.P. Simandjuntak. Selanjutnya dilakukan efisiensi ruang gerak bagi pasukan sesuai dengan taktik perang gerilya, dengan membentuk kelompok pasukan kecil dengan nama Raum. Tindakan berikutnya menentukan Kampung Sipakpahi sebagai pusat Markas Besar mulai bulan Februari 1949 karena dianggap lebih strategis dibanding Markas yang lama di Kampung Simamak.

Guna meningkatkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan memperluas perang gerilya menghadapi Belanda Komandan NDU/ALRI, Sektor “S”

oleh Letkol Laut H.P. Simandjuntak dibentuk Komando Ketentaraan Negeri (KKN) yang dipimpin oleh Perwira dan Bintara ALRI untuk mendampingi Ketua Dewan Nagri (Lurah) di tiap-tiap Kecamatan yang bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hankam dan Ipoleksos dalam rangka melindungi kepentingan Pemerintah RI. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama bahu membahu antara pihak KKN dengan pihak Dewan Nagari setempat agar jangan sampai merugikan rakyat. Tugas utama KKN antara lain:

1. Berperan aktif menggerakkan roda pemerintahan setempat dengan melindungi aparatnya, sebagai kontra informasi propaganda Belanda yang mendiskreditkan nama baik Pemerintah RI.
2. Mengurus penyediaan bahan makanan, pakaian, amunisi dan lain-lain untuk kebutuhan pasukan mobil/Raum yang berada di kelurahannya.
3. Memberikan latihan kemiliteran kepada rakyat.
4. Memberikan arahan bagi rakyat khususnya di bidang pertahanan dan keamanan masyarakat.
5. Meningkatkan semangat kerja, membangun kehidupan ekonomi/pertanian dan kesehatan dengan semboyan sambil berjuang kita membangun.
6. Sebagai penghubung tetap antara Pemerintah serta Induk Pasukan dengan rakyat.

Dewan Nagari selain berfungsi sebagai aparat pemerintah RI setempat juga bertugas antara lain untuk:

- a. Membentuk dan membina Pertahanan Rakyat Semesta (PKS) di tiap-tiap kelurahan yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda dengan kewajiban:
 - 1) Menjaga ketertiban/keamanan rakyat.
 - 2) Mengamat-amati aktivitas kaki tangan musuh.
 - 3) Menjadi kurir atau *ordonans* dan penunjuk jalan bagi pasukan mobil.
 - 4) Memberitahukan kedatangan/kepergian musuh kepada pos tentara terdekat dan rakyat.
 - 5) Membantu tentara memindahkan/mengangkut dukungan logistik dari satu tempat ke tempat lain.
 - 6) Mengikuti latihan kemiliteran.
- b. Mengumpulkan bahan makanan/beras dan menyediakan tempat guna kepentingan militer.
- c. Mengumpulkan sumbangan/iuran sukarela rakyat kepada Pemerintah/Markas Tentara.

Di samping KKN dan Dewan Nagari juga dibentuk Seksi Pasukan Mobil Marinier (SPMMO) di tiap-tiap kelurahan dengan tugas utama untuk bertempur dengan perlawanan rakyat semesta guna menghadang Belanda baik dalam konvoi maupun yang berpatroli serta membantu untuk memberikan penerangan/petunjuk di bidang Hankam kepada rakyat. Dengan terbentuknya KKN di tiap-tiap kelurahan yang masuk daerah kekuasaan NDU/ALRI sektor " S " roda pemerintahan sipil yang semula lesu kini kembali hidup dan bergerak mengatur dan membina masyarakat

seperti sebelum agresi Belanda.

Pada awal agresi militer Belanda II banyak penduduk meninggalkan kampung halaman untuk mengungsi tanpa memikirkan sesuatu tujuan yang jelas. KKN memegang peranan penting dengan memberikan pencerangan kepada rakyat sehingga secara berangsur-angsur situasi kampung pulih kembali ke arah kehidupan yang normal. Dengan demikian stabilisasi ekonomi rakyat dapat diwujudkan.

Dengan bantuan KKN dan Dewan Nagari inilah pasukan ALRI yang melakukan evaluasi ke tempat-tempat yang telah ditentukan untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Belanda. Tanggal 24 Desember 1948 pasukan Belanda mulai menduduki kota Sibolga setelah melakukan serangan dari jurusan Tarutung. Pertempuran terjadi di sebelah utara kota Sibolga dengan pasukan ALRI yang berusaha menahan gerakan Belanda. Serangan Belanda ini dilawan dengan taktik gerilya mengingat posisi geografinya.

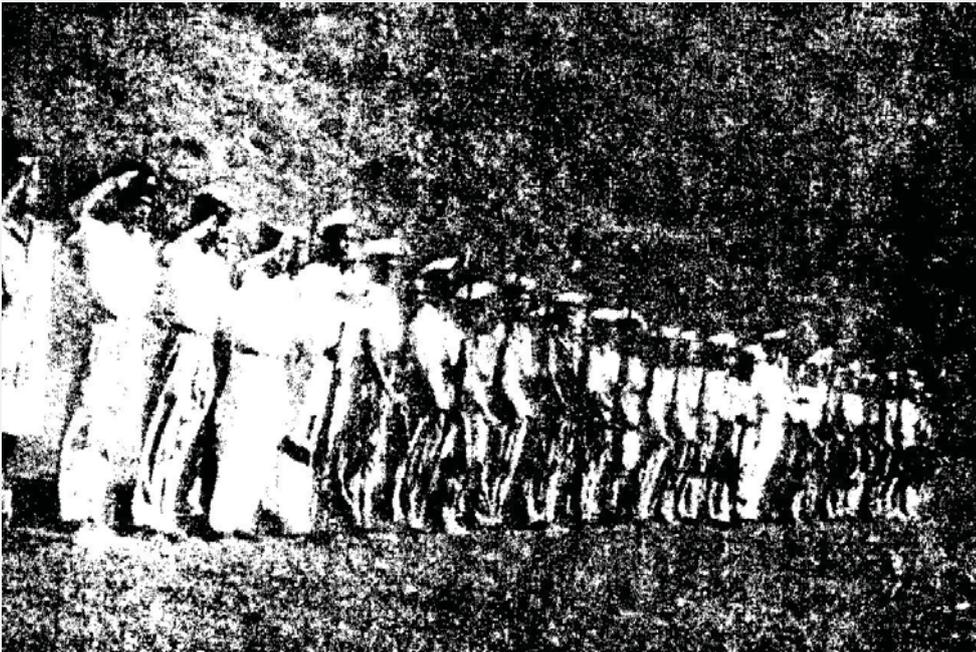
Pada malam hari 25 Desember 1948 melalui dua jurusan pasukan ALRI melancarkan serangan balasan menggempur Belanda di Sibolga. Sekelompok pasukan



Markas ALRI TAPANULI di Sihorbo (Barus) pada Masa Perang Kemerdekaan

menyerang dari arah bukit Simaremare dipimpin oleh Letnan Kolonel H.P. Simandjuntak, sedang yang lain dari arah jalan Barus dipimpin oleh Letnan I Laut Oswald Siahaan. Rombongan di bawah pimpinan Letnan I Oswald Siahaan kemudian berangkat ke Kampung Panyambanan dipinggir kota Sibolga untuk menghadang Belanda yang mengadakan patroli di Kampung Mela. Karena pasukan Belanda telah mendahului pasukan ALRI menduduki tempat tersebut, dan dengan tiba-tiba pasukan Belanda menghujani tembakan-tembakan gencar ke pasukan-pasukan ALRI sehingga tidak sempat mengambil perlindungan/perlawanan. Dalam penyerangan ini Dan Kie II Marinir Letnan I Oswald Siahaan dan Zulkifli Tanjung gugur sedangkan sisa dari pasukan mengundurkan diri ke Aloban.

Pangkalan ALRI selanjutnya dipindahkan ke Barus dan usaha-usaha



pasukan ALRI menggunakan taktik lain. Atas perintah Komandan Staf Operasi Wahiduddin Nasution, dibentuk Badan Rahasia dengan nama “*Station Pendudukan*” yang berkedudukan di Sibolga. Pembentukan stasiun tersebut untuk mengumpulkan alat-alat amunisi, perbekalan, perlengkapan dan info-info yang diperlukan. Letnan II Saman Tandjung dan Letnan Muda M.I.Achyar Pohan, mengkoordinasikan petugas-petugas dalam *Station Pendudukan* dibantu oleh Serma Hasanuddin Hutagalung, Sersan Mayor Zulkarnaen Tandjung, Sersan Mayor Schibul Pohan di tiap Badan Instansi penting, ditempatkan anggota-anggota secara rahasia terutama di Kepolisian, Perbekalan, P.U. motor - motor konvoi.

Ibu Letnan II Saman Tandjung bertindak sebagai ordonans/caraka yang sangat dipercayai. Badan rahasia ini bertugas melakukan pencurian senjata dari kantor Penyelidik Militer Khusus (PMC) Belanda di Simare-mare, sewaktu prajurit-prajurit pergi melakukan rekreasi pada malam

hari. Rusli Silalahi, Dahman Simbolon, Iljas Tandjung dan Rasiden mengatur Formasi dalam pencurian ini dibantu oleh Pohan, sedangkan di dalam Markas PMC telah dipersiapkan pula pekerja Mian Simamora dan seorang ibu pembantu rumah tangga di kantor tersebut.

Pengambilan senjata terlaksana, sebanyak 6 pucuk langsung dibawa ke Kampung Mela. Dari sini diberangkatkan dengan perahu ke arah pulau Labuan Angin selanjutnya ke Pariaha kemudian menuju Pangkalan ALRI. Pasukan Belanda melepaskan tembakan-tembakan ke arah hutan-hutan di tempat-tempat rombongan mengundurkan diri namun sia-sia.

Penyerangan secara *frontal* terhadap Belanda di bawah pimpinan Kolonel H.P. Simandjuntak dilakukan bersama-sama dengan pasukan Mujahidin yang datang dan Aceh Dalam penyerangan ini pasukan berhasil memancang bendera Merah Putih di kota Barus.

Semua pasukan kembali ke tempat semula dikarenakan adanya *cease-fire*. Sebagian pasukan menduduki kota Barus dan Kapten Wahiduddin Nasution memegang PMC. Pertempuran-pertempuran menghadapi agresi II berakhir setelah keluarnya pengumuman *cease-fire*.

MEMAHAMI MASA LALU, MEMANTAPKAN VISI KE DEPAN

OLEH ALWIN NURDIN

“Jangan sekali-kali Engkau melupakan sejarah, sebab bila demikian Engkau akan berpijak pada vakum”

“The farther you can look backward into the past, the farther you can see forward into the future”

“In het Verleden ligt het Heden, in het Nu wat komen zal”

PENGANTAR

Kata - kata bijak dari 3 orang besar : Bung Karno, Winston Churchill dan seorang pujangga bangsa Belanda, Bilderdijk sebagaimana tersebut di atas akan melandasi tema esai ini dalam ikhtiar untuk mengajak pembaca, terutama Generasi Muda Penerus Bangsa, mengenal dan memahami sejarah perjuangan bangsa melepaskan dirinya dari belenggu kolonialisme.

Kemerosotan kondisi Negara dan Bangsa kita dewasa ini dalam segala bidang bukan hanya membingungkan Generasi-generasi penerus (sudah ada 3 generasi-turunan Generasi-45!), tetapi kelihatannya juga bagi Generasi-pelaku sendiri, perkembangan yang tak terkendali ini sudah sulit untuk difahaminya kembali, apalagi menjelaskan penyebabnya serta menemukan solusinya!

Disatu fihak, Generasi-45 (yang kini memang sudah mulai langka!) tidak sempat atau mungkin lupa menjelaskan kenapa dan bagaimana proses kemunduran ini dapat terjadi, dan dilain fihak beberapa Angkatan generasi penerus secara berturut-turut sudah berjarak semakin jauh dari masa lalu itu, sedangkan realitas

kehidupan masa kini yang semakin kompleks telah menyerap seluruh perhatian mereka, sehingga tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang telah terjadi selama 60 sampai 70 tahun yang lalu itu.

Dari beberapa kali kesempatan berdialog lintas-generasi, sangat jelas terlihat bahwa terdapat *gap* yang semakin lebar antara pengalaman, pandangan dan pola-pikir Angkatan-45 sebagai pelaku dan saksi perjuangan kemerdekaan dengan alam pikiran dan sikap serta pandangan hidup Generasi-generasi pelanjut sekarang.

“Tak nyambung” katanya!

INDONESIA, *WHAT WENT WRONG?*

Dalam suatu Seminar pada tanggal 6 Juli 2006 yang mencantumkan pertanyaan di atas sebagai judul dan temanya, sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba untuk menganalisa keadaan masyarakat dan pemerintah kita yang dewasa ini sudah demikian memprihatinkan. Salah seorang telah memberikan gambaran yang begitu jelas dan jitu tentang realitas keadaan di bidang Pemerintahan dengan menunjuk adanya **ruang jarak** yang lebar antara Penyelenggara Negara

(birokrasi dan aparaturnya) dengan masyarakat yang semestinya dilayaninya secara langsung, sehingga di dalam *ruang kosong* itulah fungsi-fungsi layanan “abdi negara” dikerjakan oleh “kaum perantara” dalam berbagai bentuknya, apakah sebagai *Cukong, Konglomerat, Ali Baba, Komprador* dan *Broker* atau bahkan *Preman dan Tukang Pukul* yang berfungsi sebagai pemasok uang, barang dan jasa.

Dilapisi tengah yang remang-remang tetapi sungguh riil inilah berlangsung apa yang sehari-hari diteriakkan oleh *mass media* : **Korupsi, korupsi dan korupsi!**

Meskipun esensi dari pertanyaan tadi dapat dianggap sudah terjawab, yakni *what* atau **apa yang** salah itu, namun, kini timbul pertanyaan baru, yaitu: *why* atau **kenapa** dan **apa sebabnya** ini bisa terjadi?

Kenapa di masa - masa sesudah Era Proklamasi dan Perang Kemerdekaan yang secara gemilang telah berhasil meraih Pengakuan Kedaulatan dari dunia internasional itu, proses pembangunan justru merosot terus, hingga mencapai titik nadir sekarang di mana kita selalu tercantum di urutan teratas dalam berbagai daftar Negara berprestasi terburuk atau terendah!.

Mengambil analogi dari Ilmu Kedokteran, ibarat suatu penyakit yang sudah mencapai stadium sangat gawat, tidak cukup kita hanya menganalisisnya dari gejala - gejala yang terlihat dipermukaan pada masa kini saja (diagnosa), apalagi mencoba untuk langsung menjejalnya dengan obat-obat yang kebetulan tersedia (terapi), melainkan selain membuat suatu prognosa (*forecast* dari perkembangan penyakit itu ke depan), juga sangat penting untuk membuat suatu anamnesa (sejarah pendahuluan terjadinya penyakit itu). Dengan demikian dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul serta aspek-

aspek lain dari penyakit itu yang secara kasat mata belum kelihatan.

Maka, dalam hal Bangsa dan Negara ini pun, sebelum dapat merumuskan terapi yang tepat, perlu terlebih dahulu dibuat semacam “anamnese”, dengan cara meneliti dan memahami-ulang (retrospeksi, re-apresiasi) sejarah-awal perjuangan kita itu.

Dalam suatu Dialog Lintas-Generasi di DHD Angkatan-45, seorang tokoh aktivis Kaum Muda pernah mengomentari ceramah saya tentang Masa Perjuangan Kemerdekaan: “....*Kenapa Generasi-45 telah membuat kekeliruan dengan menyerahkan tongkat estafet kepada kaum koruptor...?*”

Begitukah pendapat Generasi Muda sekarang ?. Bagaimana menjawabnya?.

Baru pada suatu kesempatan berikutnya saya dapat menjelaskan:

“*Seandainya pun Saudara benar, itu telah terjadi karena kami terlena, tertipu dan pasti bukan disengaja*”

Pengakuan ini sungguh menimbulkan reaksi yang mengejutkan. Saya didatangi dan disalami secara mesra dengan ucapan :”*Pak, baru sekarang kami mendengar Pelaku-45 mengaku pernah membuat kesalahan!*”

Dari sinilah saya menyadari, bahwa Generasi saya, entah karena terlalu sibuk dalam menjalankan tugasnya selama masa perjuangan fisik yang tanpa hentinya berlanjut ke masa pembangunan. Atau mungkin juga karena, sebagai Generasi “Empat-zaman” (Hindia-belanda - Jepang - Perang Kemerdekaan - Pembangunan) pada usia muda remaja yang masih sangat peka terhadap pengaruh dan impresi idiil dan psikologis dari luar, telah mengalami 2 x *Culture Shock* yang dahsyat, dan telah berdampak mendalam pada kepribadian masing-masing. Pertama, pada saat Invasi

Tentara Jepang yang telah meruntuhkan kekuasaan pemerintahan Hindia-belanda, dan kedua, sewaktu kita memproklamasikan kemerdekaan dan langsung harus terjun ke dalam kancah Perang Kemerdekaan untuk mempertahankan Republik yang masih muda ini terhadap Belanda yang berkeinginan merebut kembali jajahannya yang dahulu.

KITA KURANG MEMAKNAI PERISTIWA DAN PERKEMBANGAN SEJARAH SECARA BENAR

“We Took too Many Things just for Granted”

Maafkan, saya kembali menggunakan bahasa asing ini, karena memang agak sulit untuk mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia secara singkat dan tepat. Yang saya maksud adalah bahwa sejumlah peristiwa sejarah penting yang telah menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan kita, sebenarnya berlangsung di luar perencanaan dan perbuatan kita sendiri, namun telah kita terima dan manfaatkan begitu saja sebagai anugerah yang jatuh dari langit, tanpa merasa perlu untuk mengkaji kembali bagaimana keadaan dan kondisi kita secara riil pada saat itu.

Ada 5 peristiwa tonggak sejarah yang tidak dimaknai secara benar, karena kita tidak cukup tangguh untuk mencernakan realita yang tak menyenangkan itu :

1. Pada saat kolonialisme Belanda dirobokkan oleh Jepang, status dan kondisi Indonesia masih sebagai koloni,
 - a. Politik *“Divide et Impera”* telah menghambat mobilitas horizontal dan pembauran antar-masyarakat se-Nusantara yang memang sangat heterogen serta multi-etnik, sehingga kesadaran nasional belum tumbuh merata.
 - b. Kendali pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipegang ketat oleh Belanda sendiri (*Big Five* beserta Cina, Arab dan India di lapisan tengah) sehingga pribumi hanya dapat bergerak di strata paling bawah dan tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan berkembang.
2. Pada saat Proklamasi, cita-cita “Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa” belum terwujud secara merata dan menyeluruh.
 - a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 baru merupakan wacana yang dihayati secara terbatas oleh lapisan kaum intelek dan terpelajar di kota - kota, sedangkan rakyat di pedesaan pada saat Invasi Jepang hanya mampu berbahasa daerah masing-masing karena pada umumnya masih hidup terisolir.
 - b. Justru Penguasa Militer Jepang yang mengharuskan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, atas pertimbangan *Security* mereka di masa perang.
3. Pengakuan Kedaulatan adalah pada R.I.S. di mana R.I.-Proklamasi hanya sebagai sebuah Negara-bagian. (8 bulan kemudian baru kembali ke bentuk Negara Kesatuan)
 - a. R.I.-Proklamasi hanya eksis di Jawa dan Sumatera karena tidak berhasil menegakkan 4 orang Gubernur di daerah lainnya yang sudah dikuasai Belanda.
 - b. Perang Kemerdekaan itu hanya berlangsung di Jawa dan Sumatera dan melalui 3 x Operasi Militernya, Belanda secara bertahap menciutkan wilayah R.I. sehingga akhirnya hanya

tersisa: Aceh, Tapanuli, Sumbar, Bengkulu, dan di Jawa hanya Banten dan Yogyakarta. Selainnya sudah dikaveling Belanda menjadi 15 buah Negara-bagian Federal.

4. Pada saat Pengakuan dan Penyerahan Kedaulatan kita belum terkonsolidasi

- a. Masa Pendudukan Jepang (3½ tahun) ditambah Perang Kemerdekaan (4 ½ tahun) adalah terlalu singkat – apalagi dalam situasi perang – untuk membangun aparatur pemerintahan yang lengkap, kompeten dan mampu memerintah dan memimpin sebuah Negara baru.
- b. Kita memasuki Era Pembangunan dengan hanya bermodalkan UUD-45, Filsafat atau Dasar Negara “Panca sila”, motto: “Bhinneka Tunggal Ika” dan Teks Proklamasi tanpa terlebih dahulu memiliki *blue print* yang dapat mengarahkan dan memandu pelaksanaan suatu program *Nation (Character & State) Building*.

5. Memasuki Era Pembangunan, komponen masyarakat yang paling siap adalah TNI.

- a. Tentara Nasional Indonesia memang dibentuk dan dilatih dalam suasana Perang Pasifik dan sejarah telah meletakkan tugas untuk memimpin Perang Gerilya dalam rangka Perjuangan Rakyat Semesta ke atas pundaknya.
- b. Selama Era Orde Lama (1950-1965) di mana, baik kepemimpinan nasional, maupun pemerintahan sipil masih belum stabil dan bertindak secara *trial and error*, TNI merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengawal cita-cita Republik Proklamasi yang

ikut didirikannya.

- c. Seluruh peristiwa politik militer dalam era Orla, mulai peristiwa 17 Oktober 1952, Gerakan Dewan-dewan Perjuangan di Daerah, Musyawarah Nasional untuk Rekonsiliasi, dan tragedi Perang Saudara antar TNI-Pejuang-45 (PRRI) sampai pengkhianatan G30S-PKI dapat dijelaskan dan dimaknai dari perspektif ini.

IMPLIKASI TERHADAP PROSES PERKEMBANGAN BANGSA DAN NEGARA

Jelaslah, bahwa situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas adalah garis awal dari mana kita harus melangkah memasuki Zaman Pembangunan. Sayangnya, sebagai anggota Generasi-4-zaman dan Pelaku, Saksi sekaligus Pengamat sejarah perjuangan, saya belum melihat adanya gagasan untuk menanggulangi dan membenahi semua kelemahan dan kekurangan pada modal awal yang kita miliki itu secara konseptual, fundamental dan sistematis.

Dua kali pergantian rezim pemerintahan (secara revolusioner) terbagi dalam 3 periode kekuasaan, yaitu Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi, ternyata belum menyadarkan kita bahwa **pembangunan selama ini sebenarnya telah berlangsung berdasarkan asumsi - asumsi yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan !**.

Bukankah ini yang dimaksud Bung Karno dengan memperingati kita agar “jangan berpijak pada vakum”?

Meskipun pemerintahan Soeharto pernah menciptakan GBHN dengan program

Repelita-nya, dan pemerintahan SBY mencetuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, namun mereka terlalu disibukkan oleh masalah-masalah politik, ekonomi dan militer yang berlangsung di depan mata dan harus ditanggulangi secara pragmatis, sehingga bak pepatah Belanda: *“karena hanya memperhatikan pohon, tidak tampak hutan disekelilingnya”*

Sejumlah persyaratan, kriteria, atau kondisi pokok, yang merupakan komponen dari Program Pembangunan, seperti Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mengisi fungsi-fungsi vital di semua bidang pemerintahan dan struktur ekonomi, Pengejawantahan Pancasila secara nyata dan konkrit ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai perekat solidaritas nasional, serta *last but not least* dan justru yang terpenting : yakni menghidupkan dan memotivasi kembali Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, **tidak pernah ditangani secara serius dan konsekuen, dan seolah-olah dibiarkan saja berkembang secara liar.**

Alhasil, setelah hampir 60 tahun berdiri di atas kaki sendiri, kita menemukan bahwa secara kualitatif Bangsa dan Negara kita seakan-akan masih “berjalan di tempat”, bahkan dari segi rasa cinta tanah air, kesetiakawanan sosial dan moral malahan mundur, tetapi sebaliknya secara kuantitatif kelihatannya sedang dibanjiri oleh *hardware* yang paling canggih, mutakhir dan termegah secara melimpah, walaupun sipemakai tidak selalu menuruti prosedur *software* nya secara tertib!

Pada hal, apabila kita mau bangkit kembali sebagai bangsa yang tangguh dan mampu menangkalserta mengontrol kekuatan-kekuatan dari luar yang kini sudah, dan selalu akan terus menerus berusaha merongrong kemerdekaan dan kedaulatan kita demi kepentingannya sendiri, tidak ada cara lain, kecuali **membangun kekuatan fisik dan mental kita dari dalam**

diri kita sendiri.

Sebaliknya, apabila kita tidak mengindahkan fakta-fakta nyata yang berkaitan dengan konsepsi Kebangsaan Indonesia kontemporer di zaman modern ini dan hanya terhanyut dalam kenangan zaman revolusi penuh romantika itu, atau ingin menggali kembali *grandeur* dan kemegahan kerajaan - kerajaan zaman baheula, mustahil kita akan dapat membuat diagnosa yang tepat mengenai penyakit yang kini sedang menggerogoti bangsa dan Negara secara akut, apalagi menemukan resep yang manjur dan efektif untuk penyembuhannya.

NASIONALISME SEBAGAI FONDASI NEGARA DAN JIWA BANGSA

Sebagai komponen utama dari setiap program Pembangunan Bangsa dan Negara, masalah ini perlu disorot secara khusus dan tersendiri.

Paradigma idiil ini lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu komunitas, sebagaimana dikatakan orang Perancis: *Le desire pour être ensemble* (keinginan untuk bergabung dan hidup bersama). Di dalamnya terkandung sifat-sifat kesetiakawanan serta solidaritas menghadapi lawan atau tantangan bersama, bahkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa. Rasa persatuan seperti ini pernah diuji dan ditempa di antara para pejuang kemerdekaan bersama rakyat selama pendudukan Tentara Jepang dan di dalam masa Perang Kemerdekaan. Sayangnya, karena kurang menghayati realita - realita pertumbuhan bangsa semenjak zaman kolonial, masalah ini mula - mula *dimanage* hanya secara searah dan *top-down* saja, tanpa mempertimbangkan situasi kondisi multi-etnisitas bangsa yang masih berada pada tingkat sosio-kultural yang berbeda-beda, tersebar di pulau-pulau

yang terpecah luas dan pada tahap itu masih memerlukan pembinaan yang intensif.

We took it for granted, bahwa seluruh bangsa Indonesia sudah sama majunya dan setaraf sehingga setiap protes dan tuntutan daerah atau suku dianggap pembangkangan dan dicap separatistis. Padahal, kebanyakannya hanyalah bersumber pada persoalan Keadilan dan Pemerataan rezeki.

Pemerintah Pusat cenderung menggunakan tolok-ukur yang semestinya hanya dapat diaplikasikan pada masyarakat madani di pulau Jawa yang sebagai pusat kekuasaan politik, ekonomi dan militer, memang tingkatannya sudah lebih maju dan mapan disegala bidang kehidupan.

Maka, menerapkannya secara pukul rata tanpa memperhitungkan disparitas eksosbud dan heterogenitas antar-etnik dari bangsa yang pada hakekatnya masih hidup di alam tradisional ini, sungguh menunjukkan sikap yang tidak adil, *chauvinistic* dan berpandangan pendek.

Lagi pula, bukankah Rasa Kebangsaan itu adalah ibarat ikatan batin dalam satu Keluarga Besar yang seyogianya diwujudkan dengan cara merangkul dan menggunakan persuasi, bukan dipaksakan secara represif, apalagi kekerasan fisik.

Banyak masalah mendasar lainnya sudah menumpuk ditingkat nasional maupun di daerah-daerah, karena tidak ditangani secara sistematis sehingga kini semakin sulit menentukan prioritasnya. Ini disebabkan oleh karena asumsi-asumsi situasi-kondisi yang dipakai sebagai konsiderans, dari awalnya memang kurang tepat.

MENANTIKAN PEMIMPIN MASADEPAN YANG VISIONER

Hendaknya dapat dimengerti bahwa tulisan ini sama sekali tidak berpretensi untuk menawarkan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah nasional yang sedang berkecamuk di dalam Bangsa dan Negara dewasa ini

Isinya dimaksudkan hanya sebagai bahan baku atau landasan pemikiran bagi siapa saja yang ingin mencari jalan ke luar dari kemelut bangsa dan Negara kita sekarang ini, atau dapat juga dianggap sebagai sebuah peta situasi bagi para pemikir dan perencana untuk mem"plot" dan men"trasir" rute perjalanan yang akan ditempuhnya

Bagaimanapun juga, penulis yakin, bahwa pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang realita-realita dari kondisi dan sejarah bangsa Indonesia sebagaimana adanya di masa lalu, adalah syarat mutlak untuk dapat menelusuri sebab-musabab serta menganalisa proses merebaknya penyakit-penyakit masyarakat yang sudah sedemikian parahnya dewasa ini, sehingga dengan demikian dapat disusun rencana dan program penanggulangannya berdasarkan data yang faktual serta pertimbangan yang rasional dan objektif.

Bila tidak demikian, kita hanya akan meraba-raba dikegelapan dan bertindak secara reaktif, sehingga tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.

Dengan ikhlas saya ingin menyumbangkan pemikiran saya ini terutama kepada kalangan Generasi Muda, dari mana saya harapkan akan muncul Pemimpin-pemimpin berkaliber Nasional dengan sifat Negarawan yang berwatak luhur, berkemampuan manajerial tinggi dan mempunyai visi yang jauh kedepan.

Semoga !

PERAN VETERAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN BELA NEGARA

OLEH NONO SUKARNO

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia yang berhasil diwujudkan berkat partisipasi seluruh rakyat yang berjuang bahu - membahu dengan TNI, merupakan 'warisan' yang harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut, dua aspek yang perlu dijadikan perhatian utama oleh penyelenggara negara dan seluruh warganegara adalah 'Pertahanan Negara' dan 'Pembangunan Nasional', yang di dalam mewujudkannya diperlukan peran serta seluruh komponen bangsa sesuai profesi, keahlian serta kemampuan masing - masing.

Tidak terkecuali Veteran RI yang pernah berjuang dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa memiliki potensi yang bisa digali dan digunakan bagi kepentingan negara. Pengalaman dan pengetahuan profesi militer yang dimilikinya masih dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pertahanan negara, setidaknya sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baik strategis maupun taktis. Bahkan dalam skala lebih luas yaitu pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, nilai kejuangan yang dimilikiseperti rascintatanahair,relaberkorban tanpa pamrih, ketulusan, serta patriotisme yang tetap menggelora bisa dijadikan inspirasi

bagi bangsa dalam membangun. Semua potensi yang dimiliki Veteran tersebut perlu digali dan ditransformasikan menjadi kekuatan riil melalui upaya terpadu dan terkoordinasi dari institusi yang berkaitan.

KESADARAN BELA NEGARA

Pengertian 'Bela Negara' adalah *tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara*. Bagi bangsa Indonesia semuanya itu berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dilandasi dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.

Wujud dari upaya bela negara bisa dilihat dari kesiapan dan kerelaan berkorban dari warga bangsa dalam menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara. Kenyataan dilapangan masih banyak ditemui pemahaman yang kurang tepat dari upaya bela negara ini. Pemahaman keliru tersebut, walaupun tidak bisa dikatakan salah adalah memahami bela-negara dalam *arti sempit*, yaitu hanya sebagai *upaya mengangkat senjata untuk menghadapi agresi lawan terhadap negara sendiri* (wujud fisik). Dengan demikian upaya untuk menanggulunginya cukup menjadi tanggung jawab TNI.

Padahal pengertian '*kelangsungan*

hidup bangsa dan negara pada hakekatnya menyangkut aspek yang sangat luas yaitu seluruh sendi kehidupan bangsa, sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berlanjut. Bela Negara dalam wujud fisik dan non-fisik ini dapat dilakukan dengan meningkatkan rasa nasionalisme yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan rasa cinta tanah air, dan itu bisa diwujudkan melalui *“nation and character building”* yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Ini akan berhasil apabila dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh potensi bangsa dengan pemerintah sebagai ujung tombaknya. Upaya bela Negara yang melibatkan seluruh rakyat ini tidak menyalahi konstitusi karena jelas - jelas di dalam UUD 1945 Pasal 30 disebutkan bahwa Bela Negara menjadi hak dan kewajiban dari setiap warganegara Indonesia. Sehingga, upaya bela negara ini menjadi lebih bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya.

Kesadaran bela negara suatu bangsa tidak selamanya seperti yang diharapkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Lingkungan di mana suatu bangsa eksis sangat berpengaruh pada kondisi bela negara warga negaranya. Kondisi kesadaran bela negara dari warga negara Indonesia pada saat ini boleh dikatakan dalam keadaan memprihatinkan. Kecintaan terhadap tanah air serta rasa nasionalisme yang semakin menurun, nampak seperti misalnya dari kasus - kasus pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas umum, simbol - simbol negara, bahkan tindakan - tindakan yang mengganggu kepentingan umum dll. Semuanya ini merupakan indikasi dari menurunnya kadar kesadaran bela negara dari masyarakat. Khususnya dalam menghadapi tantangan ke depan diharapkan kesadaran bela negara dari setiap warga negara RI tetap tinggi. Untuk mencapai ini dibutuhkan motivasi yang tepat yang dapat memacu warga negara untuk ikut serta dalam kegiatan pembelaan negara.

Beberapa hal yang bisa dijadikan motivasi adalah antara lain. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa, kelebihan/ keunggulan bangsa, termasuk kemungkinan ancaman yang bisa membahayakan eksistensi bangsa - bangsa.

POTENSI ANCAMAN TERHADAP NEGARA

Berbicara tentang ‘kelangsungan hidup bangsa’ tentunya tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu dan selanjutnya *m e n g g a n g u* upaya dalam mempertahankan kelangsungan hidup



bangsa dan negara. Potensi ancaman ini dapat datang baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan bentuknya dapat berupa ancaman fisik maupun non-fisik. Ancaman fisik yang berasal dari luar sampai saat ini masih bisa dikesampingkan walaupun tetap harus diantisipasi dan siap menghadapinya apabila sewaktu - waktu berubah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya untuk ancaman yang bersifat non fisik dan ini justru sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa secara keseluruhan perlu ditangani secara tepat dan sistematis.

Era globalisasi yang melanda dunia, tidak terkecuali negara kita jelas membawa perubahan baik positif maupun negatif. Bahkan hal yang positif seperti perkembangan teknologipun memiliki dampak negatif yang harus kita eliminir sehingga tidak merusak mental bangsa secara keseluruhan. Demikian pula alam demokrasi yang terus berkembang seperti pada saat ini, apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan bahaya konflik, anarkisme, dan bahkan separatisme yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Semuanya ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk memberi perhatian sepenuhnya dengan bertindak secara sistematis dan terpadu dalam menghadapinya. Yang jelas, keikutsertaan LVRI dalam mengatasi persoalan bangsa tidak akan pernah dibatasi oleh kondisi serta permasalahan internal yang sedang dihadapi.

KONDISI VETERAN RI PADA SAAT INI

Sebelum berbicara tentang apa peran Veteran dalam menyukseskan upaya Bela Negara, baiklah kita melihat kembali apa dan bagaimana situasi dan kondisi Veteran RI pada saat ini. Veteran RI sebagai mantan pejuang dan pembela kemerdekaan memiliki motto “**TRI**

DARMA”, yaitu menjaga dan memelihara ‘*Martabat Veteran*’, mengusahakan tingkat ‘*Kesejahteraan yang memadai*’ bagi anggota Veteran dan keluarganya, serta ‘*Pewarisan nilai juang 1945*’ kepada generasi penerus.

Pada saat ini Veteran RI terdiri dari Veteran Pejuang dan Veteran Pembela yang secara alamiah terus menyusut jumlahnya karena faktor usia. Veteran Pejuang yang telah melahirkan nilai-nilai kejuangan 1945 dan terbukti berhasil dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia, dalam sisa hidupnya masih berkenan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara melalui profesi dan keahlian yang dimilikinya. Hal ini patut mendapatkan apresiasi dari kita semua, dan apresiasi yang paling tepat dan bermanfaat bagi bangsa secara keseluruhan adalah tetap dilestarikannya nilai-nilai juang yang telah mereka gali dan tunjukkan keampuhannya pada masa perjuangan.

Mereka akan merasa puas dan lega melihat apa yang dulu dijadikan motivasi dan pendorong dalam perjuangan ternyata diakui dan dilestarikan oleh generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Nilai - nilai juang inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi peningkatan kesadaran bela Negara setiap warga Negara Indonesia. Dengan memiliki dan mengimplementasikan nilai juang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti menunjukkan bahwa seseorang memiliki nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah airnya sendiri.

Mengingat nilai juang ini menyangkut karakter seseorang, maka sebaiknya penanamannya dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal sejak TK sampai Perguruan Tinggi secara berjenjang dan berlanjut, maupun secara informal melalui

aktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air, sehingga bisa melekat dan menjadi gaya hidup setiap warga Negara Indonesia.

Yang menjadi pemikiran ke depan adalah apabila Veteran Pejuang sudah tidak eksis lagi, siapakah yang bisa dijadikan nara sumber dalam kegiatan pemasyarakatan Bela Negara. Satu keuntungan bagi para Veteran yang lebih muda yaitu Veteran Pembela, di mana pada eranya masih sempat berinteraksi dan bekerjasama dengan para Veteran seniornya, sehingga masih dapat menyikapi dan merasakan secara langsung bagaimana sepak terjang mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai juang di dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, yaitu dengan bekerja tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu dan pikiran demi tugas yang diembannya. Di sini pula Veteran Pembela menempati posisi strategis sekaligus memiliki tanggung jawab moral untuk menggantikan Veteran Pejuang dan meneruskan nilai-nilai juang 1945 kepada masyarakat, termasuk kepada Veteran yuniornya yang pada saat ini masih belum lahir (Veteran Perdamaian).

Karena itulah LVRI sangat *concern* segera diresmikannya keberadaan Veteran Perdamaian oleh pemerintah, sehingga estafet kepemimpinan Veteran dapat tetap bergulir secara alamiah di mana Veteran Pejuang dapat menyerahkan 'tongkat kepemimpinan' nya kepada yang lebih muda dengan perasaan legowo dan penuh kedamaian.

Dengan demikian LVRI dapat terus menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada negara dan bangsa, diantaranya dengan berperan dalam upaya membangun kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia.

PERAN VETERAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN BELA NEGARA

Setelah memahami bagaimana hakekat ancaman yang membawa dampak merosotnya kesadaran bela Negara, dihadapkan dengan kondisi Veteran saat ini, maka diperlukan adanya upaya secara terpadu dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dengan demikian, Legiun Veteran RI yang memiliki sumber daya manusia yang pernah andil langsung di dalam sejarah perjuangan bangsa, dapat berperan secara optimal melalui upaya-upaya sbb :

Lebih meningkatkan lagi pelaksanaan pemberian materi ajaran '**Pendidikan Pendahuluan Bela Negara**, dari mulai sejak Sekolah TK s/d Perguruan Tinggi (PT). Khusus untuk pendidikan setingkat SMA dan PT dapat memanfaatkan tenaga Veteran yang masih memenuhi syarat baik kesehatan maupun akademis sesuai persyaratan mengajar. Pengalaman di lapangan dari para Veteran sebagai pelaku langsung peristiwa yang terjadi akan lebih menjiwai dan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis daripada yang sekedar mendapatkannya melalui textbook. Bagi mahasiswa Perguruan Tinggi pola pemberian materi sudah harus berbeda dengan sebelumnya. Kepada mereka diberikan materi ajaran yang bersifat filosofis. Sedangkan untuk membentuk disiplin dan etos kerja yang tinggi, kepada mereka diberikan latihan fisik baik melalui pola wajib latih maupun wajib militer, di mana untuk program ini sebaiknya bekerjasama dengan TNI untuk mendapatkan tenaga pelatihnya.

Untuk meningkatkan pemahaman generasi muda atas sejarah perjuangan bangsa, mempertebal rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kepada seluruh sekolah menengah umum sebaiknya diwajibkan untuk melaksanakan **program wajib baca** bagi para siswanya. Dalam

waktu tiga tahun menyelesaikan sekolahnya setidaknya - tidaknya tiga atau empat buah buku wajib telah dibaca oleh setiap siswa. Untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka atas buku yang dibacanya, pada setiap akhir tahun mereka diharuskan membuat tulisan tentang buku tersebut dan memaparkannya kepada Guru/Dosen/Narasumber untuk dinilai sejauh mana pemahamannya tentang materi yang dibacanya. Di sinilah para Veteran dapat berperan dengan bertindak menjadi nara sumber pada saat acara pendalaman. Beberapa buku yang bisa dijadikan materi wajib baca seperti misalnya: “Habis Gelap Terbitlah Terang” (R.A. Kartini), “Indonesia Menggugat” (Bung Karno), “Lahirnya Pancasila” (Bung Karno), ataupun buku-buku lain yang baik bagi pemahaman generasi muda atas perjalanan sejarah bangsanya serta membekali mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa masa depan.

Perlu penggalakan **sejarah perjuangan daerah** khususnya oleh para siswa sekolah yang ada di daerah tersebut. Di samping mendapatkan pelajaran tentang sejarah yang bersifat nasional, untuk masing - masing daerah perlu mengingat kembali peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerahnya, termasuk tokoh - tokoh setempat dengan gaya kepemimpinan dan karismanya dalam memimpin perjuangan. Dengan memahami ini, para siswa akan menjadi sadar dan bangga akan daerahnya sendiri yang ternyata juga memiliki andil yang tidak kecil dalam upaya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan lain, mereka diajak untuk mengunjungi tempat - tempat bersejarah, yang mungkin sudah ada monumen atau tugu untuk memperingati peristiwa yang terjadi. Pada kesempatan itulah Veteran yang ada di daerah

tersebut bisa dilibatkan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang pernah terjadi dan apa peran mereka pada saat itu. Dengan cara demikian diharapkan kesadaran untuk mencintai tanah air sekaligus kesadaran bela negara dari para generasi muda akan menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan upaya-upaya seperti tersebut di atas, tentunya diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antar instansi yang berwenang untuk mempersiapkan dan mengatur segala sesuatunya demi kelancaran dan keberhasilan program ini, misalnya.

Pihak Kemdiknas :

- Menginventarisir Pengajar Materi PPBN di sekolah - sekolah/Perguruan Tinggi mana saja yang sudah /belum ada pengajar dari anggota Veteran, pengajar/dosen yang perlu diganti dsb. Selanjutnya mengirimkan daftar kebutuhan pengajar ke Kemhan disertai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pengajar.
- Menyiapkan buku - buku untuk ‘wajib baca’ dan mendistribusikannya kepada seluruh sekolah yang ada.
- Melaksanakan koordinasi dengan Kemhan/LVRI untuk menyiapkan anggotanya menjadi nara sumber dalam acara penyampaian paparan buku wajib baca.

Pihak Kemhan :

- Meminta LVRI untuk menyiapkan tenaga Pengajar sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Apabila ternyata masih banyak dari para anggota Veteran yang belum memenuhi persyaratan mengajar (misalnya belum mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan dll) ,maka pihak Kemhan dapat mempersiapkan program tersebut untuk memenuhi

permintaan Kemdiknas.

- Berkoordinasi dengan LVRI agar menyiapkan anggota Veteran baik di pusat maupun di daerah untuk menjadi nara sumber pada acara penyampaian paparan buku wajib baca di sekolah - sekolah yang membutuhkan, termasuk pada saat pelaksanaan program sejarah perjuangan daerah.
- Menjembatani antara pihak Kemdiknas dan LVRI dalam penyelenggaraan program-program yang sudah disepakati bersama.

Pihak LVRI :

- Sebagai wadah para Veteran, LVRI segera menginventarisir anggotanya yang sudah/ belum memiliki kualifikasi mengajar sesuai tuntutan akademik.
- Mengirimkan daftar anggota Veteran yang masih memiliki kemampuan untuk dijadikan nara sumber ke Kemhan untuk disalurkan / diperbantukan ke sekolahan yang memerlukan. Mengirimkan anggota Veteran yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk mengikuti program pendidikan Kewiraan di Kemhan.

Dengan upaya terintegrasi ini diharapkan sasaran pemberian materi PPBN untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dari para generasi muda akan lebih tepat sasaran. Disadari, program ini akan memerlukan *effort* yang tidak kecil, namun harus disadari bahwa hal ini merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Biaya yang dikeluarkan nantinya tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh beberapa waktu ke depan. Permasalahannya tinggal tekad dan kemauan kita untuk melaksanakannya demi masa depan bangsa dan negara tercinta.

Dukung program hijaukan wilayah

LVRI DKI tanam 5.500 pohon

DUREN SAWIT (Pos Kota) Membantu menghijaukan wilayah khususnya di Jakarta Timur, Legiun Veteran Re-publik Indonesia (LVRI) Provinsi DKI Jakarta, menanam 5.500 bibit pohon di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), Selasa (27/3). Ketua DPD LVRI Provinsi DKI Jakarta, H. W Sriyono, mengatakan, penanaman pohon sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan menyukseskan program penghijauan Pemko Jaktim melalui gerakan penanaman 1 miliar pohon.

“Penanaman pohon ini juga dalam rangka memeriahkan HUT ke-55 LVRI,” kata Sriyono pada kegiatan yang dipusatkan di samping lahan TPU Pondok Kelapa, Jl. Jend. Pol. Sukanto, Kelurahan Duren Sawit. Pada kegiatan bertajuk ‘Bakti Sosial Kebersamaan Penanaman Pohon Penghijauan’ itu dihadiri berbagai unsur keagamaan, seperti Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pengurus mesjid dan gereja di Jaktim.

MAKNA PENTING

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jaktim, Andriyansyah, mengatakan, kegiatan tersebut mempunyai makna penting dalam kehidupan beragama dan sosial di masyarakat. Yaitu, menjalin rasa toleransi dan menjaga komunikasi yang baik antar umat beragama. “Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian bersama antara pemerintah, LVRI, pengurus mesjid, pengurus gereja dan masyarakat terhadap penghijauan dan kebersihan lingkungan,” jelasnya. (yulian/ak)

EGOISME KELOMPOK MEMICU KEKERASAN DAN KERUSUHAN SOSIAL

OLEH A. AZIZ. M

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan majemuk. Bangsa Indonesia memiliki beragam agama, suku, adat - istiadat, aliran politik, aliran keagamaan, dan kelompok - kelompok kepentingan lainnya. Ini berarti terdapat perbedaan dalam kehidupan bangsa. *Founding fathers* kita dalam membangun negara ini, sudah sangat percaya, bahwa perbedaan ini bukanlah hambatan. Kemerdekaan yang kita raih lebih dari 66 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa perbedaan yang ada, justru dapat kita jadikan simbol persatuan dalam perbedaan. Salah satu pilar dari empat pilar kehidupan kebangsaan kita adalah: Bhinneka Tunggal Ika.

Perbedaan yang ada pada bangsa kita saat ini sering mendapat ujian. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa perbedaan yang ada, masih kurang kita sikapi dengan arif dan bijaksana, baik perbedaan karena pandangan agama, pandangan politik, kepentingan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan lain - lain. Kekerasan dimulai dengan perselisihan, ketidakpuasan, teror, ancaman, penganiayaan, pembakaran sampai akhirnya perbuatan sadis. Kekerasan juga dipicu oleh berbagai kasus, seperti perebutan lahan, bahkan kekerasan yang mengarah pada separatisme, yang banyak muncul akhir - akhir ini, dan menimbulkan berbagai kerusuhan sosial.

Kekerasan dan kerusuhan ini selalu memunculkan banyak korban, baik korban materi maupun korban jiwa atau pembunuhan. Lebih buruk lagi, kerugian ini sesungguhnya bukan hanya dialami oleh masyarakat korban konflik, tetapi oleh kita semua sebagai bangsa yang besar dan majemuk. Akan sulit bagi kita, untuk menyembuhkan luka akibat banyaknya kekerasan yang terjadi, apalagi membangun kembali persatuan dan kesatuan kita.

Melihat hal ini, sebagai bangsa Indonesia dan utamanya sebagai umat yang beriman kepada Allah SWT, kita dituntut untuk menjelaskan bagaimana kekerasan itu seharusnya tidak terjadi dan tidak perlu terjadi. Sebagai bangsa, kita sebenarnya memiliki falsafah yang kuat, yaitu falsafah Pancasila, sebagai bagian dari empat pilar kebangsaan selain, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu menghayati dan mengamalkannya kembali, agar tetap bersatu mewujudkan kesejahteraan yang kita cita - citakan. Kita perlu mewujudkan toleransi antar sesama umat beragama, mematuhi koridor hukum dalam menyelesaikan setiap persengketaan, dan tetap menegakkan keadilan serta kebenaran dalam kondisi apapun.

Kita akan menjadi bangsa yang kuat, adil dan makmur, kalau kita menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan dan hukum di negeri kita. Sebagai umat beragama, melihat hal ini, kita

dituntut untuk arif dan bijak dalam menghadapi segala macam perbedaan itu. Karena sesungguhnya, segala macam perbedaan itu merupakan rahmat bagi kita sebagai bangsa. Kemajemukan kita sebagai bangsa adalah *sunnatullah* yang memiliki maksud agar kita saling mengenal, saling memahami satu sama lainnya.

Saling mengenal, saling menghormati, saling memahami, dan bekerja sama dalam konteks kemajemukan bangsa akan melahirkan sebuah masyarakat sipil yang berkeadaban yang sering kita sebut dengan istilah masyarakat madani. Yaitu, sebuah masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak minoritas, kesetaraan dan keadilan gender, persamaan di muka hukum, menghargai perbedaan agama, etnis dan budaya. Inilah masyarakat ideal, yang kita cita-citakan bersama, yakni masyarakat demokratis, di mana warganya selalu mengedepankan dialog, musyawarah dan menghindari segala bentuk kekerasan atau konflik sosial.

Masyarakat yang demikian, tentu saja tidak bisa terbentuk begitu saja seperti membalikkan telapak tangan, tetapi masyarakat demikian harus kita bentuk dan kita rajut secara bersama - sama. Salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan adalah mengikis sikap egois. Yakni egoisme individu yang mementingkan diri sendiri maupun egoisme kelompok yang mementingkan kelompok dan golongannya sendiri.

Sikap mementingkan diri sendiri maupun mementingkan kelompok sendiri, kerap kali membawa kita pada sikap *takabbur*, sombong, merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain, menganggap diri sendiri paling benar, menganggap kelompok sendiri yang paling hebat.

Dalam agama Islam sikap *takabbur* : merupakan sikap yang tercela yang harus kita hindari.

Kelompok yang tidak mau bersikap arif terhadap perbedaan adalah kelompok yang egois, yakni kelompok yang mementingkan golongannya sendiri. Kelompok yang demikian dapat melahirkan egoisme kelompok yang memiliki potensi untuk memicu lahirnya kekerasan dan konflik sosial. Untuk ini Allah telah mengingatkan kepada kita dalam salah satu firmanNya, yang artinya :

“Hai orang - orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari kamu dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk - buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang - orang yang zalim”.

(QS. Al-Hujarat 49:11)

Dengan memahami pengertian tersebut, maka untuk menghindari lahirnya egoisme kelompok, kita harus bersikap tawadhu' (rendah hati), yakni menghargai segala bentuk perbedaan, tidak memandang rendah kelompok lain, berusaha mendengarkan dan menerima kebenaran yang datang dari kelompok lain. Jika kita dapat bersikap demikian, maka kita layak menyandang apa yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai *ibadurrahman* (hamba - hamba Allah yang penyayang), yakni kelompok pengayom minoritas dan pioneer perdamaian.

OBROLAN BEBAS

DUNIA DIPENUHI LANSIA

Jumlah penduduk lansia umur 80-90 akan semakin meningkat. Dalam 5 tahun ke depan jumlah lansia umur 65 ke atas sudah akan melampaui jumlah Balita. Pertumbuhan penduduk lansia umur 65 tahun ke atas di negara berkembang lebih cepat dan lebih besar jumlahnya daripada di negara maju, sehingga beban negara – negara berkembang akan semakin berat.

Ada masalah pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, panti asuhan dan lapangan pekerjaan bagi para lansia. Sekarang usia pensiun PNS/TNI/Polri 58 tahun, nanti mungkin 65 tahun karena ternyata pada usia 60 orang justru mencapai puncak profesionalismenya.

Data Veteran saat ini kurang lebih 300.000 orang, yaitu Pejuang 45 kurang lebih 248.000 orang sedangkan Pembela kurang lebih 52.000 orang. Para Pejuang 45 itu sekarang sudah berusia rata - rata di atas 80 tahun, sedangkan yang Pembela rata – rata di atas 70 tahun. Legiun Veteran sekarang ini sudah menjadi Legiun lansia.

DULU 5-M SEKARANG 5-K

Para pemuda di jaman dulu selalu diingatkan untuk tidak melanggar 5-M agar bisa menjadi orang yang berhasil dalam masyarakat. 5-M itu adalah akronim untuk Maling, Main, Minum, Madon dan Madat. 5-M adalah penyakit masyarakat di jaman dulu yang harus dihindari para pemuda.

Di jaman sekarang penyakit masyarakat itu ditambah dengan akronim 5-K, yaitu Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan, Kerusakan Moral dan Korupsi. Jadi sekarang para pemuda harus waspada terhadap 5-M dan

5-K!

Yang mengherankan di jaman sekarang tidak hanya para pemudanya yang harus diberi peringatan, tetapi juga para pemudinya. Kita tidak habis berpikir ada pemudi mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk karena narkoba dan menabrak orang sampai 9 tewas. Kita juga tidak habis berpikir mengapa sekarang tidak sedikit pemudi atau bahkan ibu – ibu yang harus diadili karena korupsi bermilyar rupiah.

JAS MERAH & LURAH

Jangan sekali – kali meninggalkan sejarah atau disingkat JAS MERAH ! Itu pikiran orang jaman dulu. Orang jaman sekarang, juga para pemimpin kita, banyak yang melupakan sejarah atau singkatannya menjadi LURAH.

Banyak yang tidak tahu bahwa dulu ada Perang Kemerdekaan, bahwa kita harus mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dengan darah dan jiwa, bahwa kita harus bertempur melawan para penjajah, bahwa kita punya banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Oleh karena itu Indonesia adalah Negara dengan banyak Taman Makam Pahlawan

Kalau Taman Makam Pahlawan di Kalibata tertutup untuk para pahlawan Bintang Gerilya, di mana muka bangsa Indonesia harus ditaruh kalau di ibu kota negaranya tidak ada taman makam para pahlawan yang dulu berjuang mengangkat senjata melawan para penjajah ? Apa yang bisa dibanggakan dari Taman Makam para elit birokrat yang bekerjanya hanya di belakang meja ?

JAGA GARDU



Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia
turut berduka cita atas meninggalnya :

Paiman A (NPV. 13. 000. 042)	Anggota DPC LVRI Sumbawa. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (8 Januari 2012)
M. Daud AD (NPV. 1. 010. 497)	Ketua DPC LVRI Kab. Aceh Tengah, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah (20 Januari 2012)
Ridhuan (NPV. 21. 171. 220)	Anggota Macab LVRI Kota Bengkulu, Propinsi Riau (20 Januari 2012)
Beluh Tarigan (NPV. 2. 003. 875)	Anggota Dewan Pimpinan Ranting (DPR) LVRI, Kec. STM Hulu, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut (4 Februari 2012)
Djamil (NPV. 2.009. 890)	Anggota Dewan Pimpinan Ranting (DPR) LVRI, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut (15 Februari 2012)
H. M. Djaseri (NPV. 15. 024. 236)	Ketua DPC LVRI, Kab. Hulu Sungai Selatan di Landasan (13 Maret 2012)
Kol. INF (Purn) Ano sutisno (NPV. 21. 119. 730)	Ketua DPC LVRI Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat (18 Maret 202)
Bapak R. Susila Sudiroatmadja (NPV. 10. 033. 802)	Ketua DPC LVRI Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (18 Maret 2012)

Semoga amal perjuangannya di teruskan oleh generasi muda kita

TAMAN
MAKAM
PAHLAWAN

SAMPURNA RAGA



DATA KORBAN PERISTIWA TRISILA AN
MILITER MELANIA DAN MULOGEDE
NO. PONDOK : 100 0000
1. 000 000 1 00 0000
1. 000 000 1 00 0000
1. 000 000 1 00 0000
TAMBAH MELAMPAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN
SAMPURNA RAGA SURABAYA 01 421 0000

